

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1. Deskripsi Lokasi Penelitian**

##### **4.1.1. Universitas Brawijaya ( Unibraw )**

Saat ini Unibraw telah dipercaya oleh pemerintah mengelola 10 fakultas, sebuah politeknik dan program pascasarjana, untuk melaksanakan dengan baik program-program pendidikan tersebut. Cakupannya ada yang bersifat akademik serta ada yang profesional. Pada jenjang pendidikan akademik memiliki 40 program studi strata satu ( S 1 ), 17 program studi strata dua ( S 2 ), dan 5 program Doktor ( S 3 ). Untuk jenjang pendidikan profesional, terdiri 6 macam program dokter spesialis 1, 3 program diploma satu, 18 program diploma tiga, 8 program studi di politeknik, dan sebuah program diploma empat ( D 4 ).

##### **4.1.1.1 Daya Tampung**

Peningkatan daya tampung tentu mempunyai implikasi kepada penerimaan mahasiswa baru pada setiap program studi yang telah ada. Pembentukan setiap program studi baru selalu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan membawa dampak terhadap penyediaan dana serta fasilitas lainnya untuk membiayai program studi baru tersebut. Di Unibraw Jumlah mahasiswa baru pada tahun akademik 2002/2003 sebanyak 8.686 mahasiswa dengan rincian sebagai berikut : 1.372 mahasiswa Program S 0 ( diploma ), 3.452 mahasiswa Program S 1 Reguler, dan 1.932 mahasiswa Program Ekstensi, 486 orang Program S 2, 120 orang Program S 3, 28 orang Program Dokter Sp-1, 57 orang Program Magister Ilmu Administrasi serta 1.239 orang mahasiswa Politeknik. Dari data program S 1 di atas, sebanyak 2.597 mahasiswa diterima melalui jalur Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru ( SPMB ), 647 orang mahasiswa melalui jalur Penjarangan

Siswa Berprestasi ( PSB ), sejumlah 193 merupakan mahasiswa alih jenjang, 6 mahasiswa pindahan, juga tercatat 9 mahasiswa dari luar negeri, 1.932 orang mahasiswa program ekstensi, sedangkan dari Politeknik sebanyak 1.329 orang mahasiswa.

Selama dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, jumlah mahasiswa terdaftar Unibraw selalu mengalami kenaikan. Pada tahun 1998/1999 sebesar 15,42 %, tahun 1999/2000 sebesar 13,54 %, dan tahun 2000/2001 tercatat 8,11 %. Sedangkan untuk tahun 2002/2003 jumlah mahasiswa terdaftar 31.594 orang atau mengalami kenaikan sebesar 4,13 % dari jumlah mahasiswa terdaftar.

Peningkatan daya tampung di Unibraw dilakukan karena semata-mata adanya indikasi bertambahnya lulusan SMU nampak sekali saat pendaftaran masuk mahasiswa baru dari lulusan SMU, SMK dan MAN. Meskipun ada alternatif lain dengan meningkatnya daya tampung, yaitu secara tidak langsung membuka lahan baru bagi jajaran staf pengajar dan administrasi, akan tetapi yang harus menjadi catatan adalah jangan sampai mengganggu aktivitas belajar mengajar mahasiswa reguler ( umum ), sementara ini jumlah prosentase terbesar dari daya tampung di dominasi oleh program ekstensi. Bertambahnya daya tampung otomatis akan membuka kesempatan lebih banyak bagi semua lulusan SMU untuk memasuki jenjang pendidikan tinggi ( PT ) yang memang saat ini harus mendapat perhatian dan prioritas utama dari Pemerintah. Apalagi untuk menghadapi era globalisasi yang sudah harus diberlakukan mulai tahun ini. Senyampang dengan itu, saat ini situasi dan kondisi bangsa Indonesia yang sedang terpuruk, tidak saja dari segi ekonomi dan politik, tetapi tingkat kualitas SDM nya pun juga sedang mengalami degradasi. Hal inilah yang semestinya harus diprioritaskan oleh para jajaran pengambil keputusan.

#### 4.1.1.2. Produktivitas

Strategi yang harus ditempuh dalam upaya menaikkan produktivitas dan mutu pendidikan dilakukan dengan meningkatkan peranan dosen pembimbing akademik dan penerapan SKS dengan perbaikan cara evaluasi dua tahun pertama dan pada dua tahun kedua. Dilakukan pula peningkatan koordinasi oleh Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) dengan bagian terkait di fakultas - fakultas serta memberlakukan batas lama studi maksimal melalui mekanisme pemantauan lebih intensif. Upaya tersebut tentu dapat memacu para mahasiswa untuk menyelesaikan studinya tepat waktu. Sejak dari tahun akademik 1996/1997 telah diberlakukan pelaksanaan kurikulum nasional di semua fakultas.

Sampai saat ini Unibraw telah meluluskan sebanyak 58.343 lulusan dari berbagai bidang kesarjanaan dan tingkat strata. Selanjutnya produktivitas dari tahun ke tahun mengalami kenaikan dengan diikuti pula oleh program perpendekan lama masa studi. Produktivitas berdasarkan perhitungan AEE pada tahun akademik 2001/2002 sebesar 15,21 %, mengalami sedikit penurunan dibanding produktivitas lulusan tahun 2000/2001, yaitu sebesar 16,91 %. Capaian rata-rata indeks prestasi kumulatif (IPK) pada tahun 2001/2002 meningkat dari 3,05 menjadi 3,09.

Sesuai dengan permintaan pasar tenaga kerja yang penuh dengan kompetensi dan juga untuk memenuhi tuntutan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan, kebutuhan pembangunan nasional yang terus berkembang Unibraw dengan segala upaya meningkatkan kualitas lulusannya.

Tentu saja produktivitas kelulusan di Unibraw diharapkan tidak hanya sekedar lulus atau memenuhi permintaan lapangan pekerjaan, tetapi lebih dari pada itu lulusan Unibraw diharapkan dapat memberikan arti yang lebih bagi

pembangunan, dapat membuka lapangan pekerjaan sendiri dan dapat bersaing dengan lulusan PT lain juga mampu bersaing dengan baik di sektor lapangan pekerjaan. Indonesia yang masih tertinggal dalam berbagai macam sektor, masih sangat membutuhkan peran serta para sarjana untuk peduli dalam pembangunan segala bidang.

#### **4.1.1.3. Staf Pengajar ( Dosen )**

Pada tahun ini jumlah staf pengajar atau dosen yang dimiliki oleh Unibraw sebanyak 1.475 orang. Dibandingkan dengan tahun 2001/2002 telah menunjukkan adanya penambahan sebanyak 6 orang. Dilihat dari jumlah dosen biasa terus mengalami kenaikan, maka sampai saat ini ratio dosen dan mahasiswa yaitu sebesar 1 : 13 untuk bidang ilmu-ilmu sosial, sedang bagi ilmu eksakta rasionya 1 : 14. Peningkatan staf pengajar dari tahun ke tahun selalu terus diupayakan. Hal ini terlihat dengan banyaknya jumlah dosen secara berjenjang mengikuti studi lanjut. Staf pengajar berkualifikasi S 2 dan S 3 yang sedang tugas belajar dari tahun ke tahun mengalami kenaikan sangat berarti bagi pengembangan instuisi.

Peningkatan kualitas staf pengajar khususnya yang berkaitan dengan disiplin ilmunya ditempuh dengan cara mengirimkan dosen untuk mengikuti studi lanjut pada Program S 2 dan S 3, Keprofesian, Kursus singkat, Seminar dan program-program lain baik di dalam maupun luar negeri.

Dari 1.475 orang staf pengajar di Unibraw yang berkualifikasi Doktor sebanyak 162 orang, S 2 dan ( yang termasuk Sp 1 ) sejumlah 743 orang, sedangkan sisanya 570 orang masih berkualifikasi S 1. Dari data tersebut dapat diprosentasekan bila yang berkualifikasi S 2 dan S 3 sebesar 73 %, suatu angka yang cukup baik bagi sebuah PT, walaupun penyebarannya tidak

cukup merata pada tiap-tiap fakultas. Sedangkan bila dilihat dari pangkat dan golongannya, 658 orang dosen dengan pangkat golongan III, serta 528 orang berpangkat golongan IV.

Tidak kurang dari 90 orang Guru Besar atau Profesor yang saat ini dimiliki oleh Unibraw. Dari jumlah tersebut yang 6 orang telah memasuki masa purna tugas, 9 orang sudah meninggal dunia, dengan demikian ada sekitar 75 orang Guru Besar di Unibraw yang masih aktif. Peningkatan kualitas dosen selalu mendapat perhatian berbagai pihak, pada tahun 2002 sebanyak 138 orang mengikuti program pendidikan S 2, dan 119 orang sedang menempuh pendidikan S 3 di dalam negeri. Adapun yang mengikuti program S 2 dan S 3 di luar negeri sebanyak 18 orang. Dengan semakin meningkatnya kualitas staf pengajar di Unibraw baik yang berkualifikasi Magister utamanya bergelar Doktor ( S3 ) maka dengan sendirinya dapat meningkatkan kualitas lulusan-alumni Unibraw agar dapat bersaing didunia lapangan pekerjaan. Karena betapa penting seorang staf pengajar bagi lembaga pendidikan, apalagi Unibraw sebagai perguruan tinggi selalu dituntut untuk mengembangkan penelitian, teknologi dan ilmu pengetahuan.

#### **4.1.2. Universitas Negeri Malang ( UM )**

Universitas Negeri Malang bertujuan menyelenggarakan pendidikan untuk menyiapkan mahasiswa agar menjadi warga negara yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, tenaga pengembang dalam ilmu pendidikan dan keguruan, tenaga pengembang yang ahli dalam berbagai bidang ilmu, teknologi, sosial budaya, dan seni. Juga untuk meningkatkan kemampuan dan ketrampilan profesional para lulusan mampu mengembangkan serta menyesuaikan diri dengan berbagai situasi dan perubahan yang terjadi. Selain itu UM juga menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di

bidang pendidikan serta non kependidikan, pengabdian kepada masyarakat untuk menerapkan ilmu, teknologi, sosial budaya, dan seni secara langsung dalam rangka pengabdian kepada masyarakat.

Dalam rangka untuk mencapai tujuan tersebut UM memiliki tugas pokok menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, dengan meletakkan bidang kependidikan sebagai misi kelembagaan yang utama, pengembangan organisasi, institusi, dan komunitas. UM mempunyai pola ilmiah pokok dalam pembinaan SDM untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, sosial budaya, dan seni yang diterapkan berdasarkan skala prioritas dalam pembangunan nasional.

#### **4.1.2.1. Daya Tampung**

Daya tampung ialah tingkat kemampuan berbagai faktor secara terpadu untuk menampung permintaan masuk yang layak. Kemampuan daya tampung tersebut selalu dikaitkan dengan rencana penerimaan mahasiswa baru dalam tahun akademik tertentu. Dalam tahun 2002/2003 daya tampung mahasiswa baru UM sebanyak 2.571 orang.

Pada semester ganjil – genap 2002/2003 tercatat sejumlah 2.549 orang mahasiswa yang terdiri dari : program strata satu sebanyak 2.306 orang dan program Pascasarjana 243 orang mahasiswa Sedangkan mahasiswa terdaftar yang melakukan her-registrasi pada semester gasal 2001/2002 sebanyak 9.431 orang, terdiri dari program Doktor 172 orang, program Magister 691 orang, program Sarjana ( S I ), program Diploma III 796 orang, program Diploma II ( PGSD ) 1.367 orang, program akta mengajar 48 orang.

Seperti halnya PT lain, UM tiap tahun mengalami kenaikan daya tampung mahasiswa baru meskipun prosentase kenaikannya tidak terlalu banyak. UM

disamping program reguler, program pascasarjananya cukup diminati oleh para pendaftar, hal ini disebabkan karena pada program pascasarjana UM sudah cukup dikenal di masyarakat. Upaya kenaikan daya tampung pada program reguler, semata-mata dikarenakan pada akhir-akhir ini jumlah peserta test masuk di UM juga mengalami kenaikan. Tentu saja peningkatan jumlah daya tampung sangat mempengaruhi anggaran / biaya di UM dengan signifikan.

Meskipun ada kecenderungan daya tampung dan jumlah mahasiswa di UM setiap tahun mengalami kenaikan, akan tetapi UM yang berkonsentrasi untuk mencetak tenaga guru ( fungsional ) tetap memprioritaskan kualitas mahasiswa barunya. Hal ini dapat dilihat saat penerimaan mahasiswa baru, hanya 10 % dari calon mahasiswa pendaftar yang diterima menjadi mahasiswa baru UM.

#### **4.1.2.2. Produktivitas**

Jumlah lulusan UM pada tahun akademik 2002/2003 sebanyak 1.569 orang, terdiri dari 13 orang lulusan program Doktor ( S 3 ), 146 orang lulusan program Magister ( S 2 ), 1.085 orang lulusan program Sarjana ( termasuk program penyetaraan S 1 ), 126 orang lulusan program Diploma III, 100 orang lulusan program Diploma II, dan 99 orang lulusan program Akta Mengajar.

Sedangkan yang dimaksud dengan produktivitas adalah presentase lulusan yang dihitung relatif terhadap jumlah mahasiswa terdaftar pada tahun kuliah yang sama. Apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, secara rinci adalah sebagai berikut : Tingkat produktivitas program Doktor sebesar 9,85 %, program Magister sebesar 23,47 %, program Sarjana sebesar 17,48 %, program Diploma III sebesar 100 %, dan program Diploma II : 10,17 %. Tingkat produktivitas program Sarjana sebesar 17,48 % tersebut sudah lebih tinggi dari rata-rata tingkat produktivitas nasional yang diharapkan, yaitu

sebesar 15 %. Perbandingan pada tingkat produktivitas program Sarjana antar fakultas adalah sebagai berikut. Tingkat produktivitas tertinggi diraih oleh FE sebesar 28,12 %, sedangkan fakultas lainnya secara ber turut-turut adalah FT sebesar 11,83 %, FMIPA sebesar 19,17 %, FIP sebesar 15,63 % dan FS sebesar 13,76 %.

Oleh karena UM merupakan PT yang dikhususkan untuk mencetak tenaga guru atau pendidikan, maka sebagian besar lulusan UM berprofesi sebagai staf pengajar. Lulusan dan produktivitas pada tiap tahun selalu dipicu karena memang kali ini tenaga guru khususnya tenaga guru di luar pulau jawa masih sangat dibutuhkan. Tentang kualitas kelulusan UM pada umumnya sudah dapat diterima oleh lembaga atau institusi pendidikan dimana yang bersangkutan mengabdikan dirinya. Berkaitan dengan dampak kebijakan pendidikan, produktivitas kelulusan merupakan suatu jawaban bukti riil dari pada aksesibilitas memperoleh kesempatan pemerataan pendidikan tinggi.

Dari data yang ada selalu menunjukkan angka kanaan tingkat produktivitas di UM. Sebagai lembaga pendidikan pemerintah ( PTN ) yang diberi tugas khusus mencetak tenaga guru ( profesional ), maka UM selalu dituntut untuk mengedepankan kualitas kelulusannya. Sesuai dengan peraturan yang berlaku bahwa tenaga guru merupakan tenaga potensial siap pakai. Atas dasar inilah UM sampai saat ini masih menjaga kualitas lulusan dan produktivitasnya sesuai dengan kualifikasi standarisasi nasional. Formasi tenaga guru masih dibuka lebar, sedangkan untuk PNS non guru semakin sulit dan sedikit. Oleh sebab itu keberadaan Universitas Keguruan ( IKIP ) masih sangat diperlukan, karena hanya lembaga inilah yang mencetak tenaga guru. Guru sebagai pendidik bangsa , bagi suatu negara sosok Guru adalah figur masa depan.

#### 4.1.2.3. Staf Pengajar ( Dosen )

Jumlah staf pengajar atau dosen di UM saat ini berjumlah sebanyak 908 orang dengan klasifikasi 349 orang ( 34,99 % ) Sarjana, 484 orang ( 53,30 % ) Magister atau Master, dan bergelar Doktor mencapai 559 orang ( 69,56 % ). Jumlah Dosen tersebut telah tersebar di kelima fakultas, yaitu, FIP 273 orang, FS 182 orang, F MIPA 232 orang, FE 63 orang, dan FT 158 orang. Sampai dengan akhir tahun 2002 dosen UM yang sedang mengikuti studi baik didalam maupun di luar negeri sebanyak 239 orang ( 26,32 % ), dengan rincian, 158 orang program Magister, 5 orang program Master, dan 68 orang program Doktor dalam negeri, serta 8 orang program Doktor luar negeri.

Untuk meningkatkan kemampuan seorang staf pengajar dalam melaksanakan kegiatan perkuliahan telah diselenggarakan Pelatihan Pendekatan Terapan ( *Applied Approach* ). Sampai saat ini sudah dilaksanakan 15 angkatan dengan peserta masing-masing angkatan 20 orang dari lima fakultas. Secara keseluruhan dosen yang telah mengikuti kegiatan *applied approach* adalah 342 orang atau 37,67 %. Disamping mengikuti pelatihan, dosen muda, utamanya lulusan non kependidikan dilaksanakan Program Pengembangan Ketrampilan Dasar Teknik Instruksional ( PEKERTI ), tercatat sampai detik ini telah mengikuti penataran sebanyak 104 orang atau 11,43 %.

Seiring dengan kehadiran UM di tengah-tengah masyarakat sebagai lembaga pendidikan yang sudah cukup usia maka wajar saja di UM sudah cukup banyak memiliki tenaga pengajar dengan kualifikasi Doktor maupun Magister. Kebijakan untuk meningkatkan kualitas dosen selalu diprioritaskan, hal ini disebabkan karena terjadi korelasi positif antara kualitas dosen dengan kualitas siswanya atau mahasiswanya.

Sebagai lembaga pendidikan tertua di kota Malang, maka otomatis UM memiliki sejumlah staf pengajar ( dosen ) yang sudah senior baik dari segi kepangkatannya, maupun dari segi kualifikasi tingkat stratanya ( S 2, S 3 serta Guru Besarnya ). Maka wajar saja apabila UM mempunyai Guru Besar dan Doktor cukup banyak. Hal ini secara tidak langsung menjawab pandangan dan penilaian berbagai pihak tentang kualitas dan mutu lembaga pendidikan yang selalu dikaitkan dengan strata tingkat pendidikan dari staf pengajarnya. Dengan kata lain, semakin banyak jumlah Doktor dan Profesor yang dimiliki institusi pendidikan, maka lembaga tersebut semakin lebih baik

#### **4.1.3. Universitas Muhammadiyah Malang ( UMM )**

**UMM** berdiri megah diantara puluhan PT lain di kota Malang. Kota asri di sebelah selatan Surabaya yang terkenal dengan kota sejauk ini terhampar didaerah perbukitan yang di kelilingi Gunung Arjuna, Kawi, Semeru dan Bromo. Daerah berbukit dengan ketinggian 800 m dari permukaan air laut dengan wisata pantainya indah seperti Ngliyep, Bale Kambang, dan Sendang Biru, menjadikan kota ini terlihat alami, cantik dan sangat sejuk dengan suhu udara berkisar antara 21 - 25 derajat celcius, sehingga Kota Malang menjadi tujuan wisata utama bagi masyarakat Jawa Timur. Kondisi alam yang demikian asri ini sangat cocok untuk tempat belajar, sehingga tidak salah jika kota Malang disebut Kota Pendidikan.

Sebagai kota pendidikan, tentu saja biaya hidup relatif murah, sarana transportasi mudah, serta banyak tersedia sarana serta prasarana belajar, baik yang berada di dalam kampus maupun yang di luar kampus seperti balai penelitian, laboratorium, perpustakaan, dan lain sebagainya.

Kampus UMM berlokasi sangat strategis, yaitu Kampus I di Jalan Bandung, Kampus II di Jalan Bandungan Sutami (Sumbersari) dan Kampus III di Jalan Raya Tlogomas (Kampus Putih) berada diantara Kota Malang – Kota Batu dekat terminal antar kota Landungsari. Kampus III diproyeksikan sebagai kampus terpadu, dengan tata letak bangunan alami disesuaikan dengan topografi tanah. Terdapat beberapa bangunan perkantoran, gedung perkuliahan, laboratorium, perpustakaan dan bangunan penunjang lain terhampar asri di atas sebidang tanah yang bergelombang dan dipercantik dengan kolam yang luas, taman satwa serta dihijaukan oleh aneka macam pepohonan langka, asri, sejuk dan nyaman. Kampus Putih UMM yang bernuansa Islam dilengkapi dengan bangunan Masjid A.R Fachruddin. Masjid berlantai V yang diresmikan oleh Presiden Habibie ini merupakan masjid kampus terbesar di Asia Tenggara. Bangunan ini menandakan bahwa UMM selain punya obsesi mencetak cerdas cendekia yang profesional di bidang IPTEK, juga sangat perhatian terhadap perkembangan Islam. Hal ini sesuai dengan motto UMM, yaitu Membangun Wacana Keilmuan dan Keislaman.

UMM berdiri pada tahun 1964 dengan membuka beberapa fakultas, yaitu Ekonomi, Hukum, Ilmu Keguruan & Ilmu Pendidikan, serta Jurusan Ilmu Agama merupakan cabang dari Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ). Tahun 1968 UMM terpisah dari UMJ dan membuka Fakultas Kesejahteraan Sosial (berafiliasi dengan UM) serta perubahan FKIP Jurusan Pendidikan Agama menjadi Fakultas Tarbiyah di bawah naungan Departemen Agama. Tahun 1970 Fakultas Kesejahteraan Sosial berubah menjadi Fakultas Ilmu Sosial dan Tahun 1975 resmi terpisah dari UMJ. Perkembangan selanjutnya, UMM membuka Fakultas Teknik (1977), Fakultas Pertanian (1980), Fakultas Psikologi (1985),

Fakultas Peternakan ( 1988 ), Program Pascasarjana ( 1993 ), dan tahun 1994 membuka Akademi Keperawatan ( Akper ) dan Fakultas Kedokteran ( 2001 ). Hingga tahun ini UMM memiliki 10 Fakultas, 30 Jurusan, 3 Program Studi Magister, dan Akademi Keperawatan. Dosen Pembina di UMM 89 % berkualifikasi S 2 dan S 3, lainnya S 1.

Saat ini UMM telah memiliki sekitar 26.508 mahasiswa yang berasal dari berbagai pelosok tanah air dan luar negeri ( Amerika, Australia, Selandia Baru, Arab Saudi dan Malaysia ). Ditinjau dari asal SMU, sebagian besar mahasiswa UMM berasal dari SMU negeri. Pekerjaan orang tua mahasiswa juga beragam, mulai dari swasta, PNS, TNI/Polri, dan Petani. Jumlah lulusan hingga semester genap 2001/2002 sebanyak 40.637 orang, baik S 1, S 2 maupun program D 3.

#### **4.1.3.1. Daya Tampung**

Daya tampung dapat diartikan sebagai kemampuan PT untuk menampung permintaan masyarakat masuk ke PT yang sesuai dengan kapasitas dari PT tersebut. Biasanya daya tampung diprogram sesuai dengan perencanaan penerimaan mahasiswa baru dalam tahun akademik tertentu. Sedangkan pada tahun akademik 2003/2004 kemampuan daya tampung di UMM sebanyak 5.432 orang.

Sedangkan jumlah mahasiswa terdaftar pada tahun akademik 2003/2004 sejumlah 19.896 orang tersebar di 12 fakultas di lingkungan UMM, termasuk Fakultas Kedokteran yang sudah mulai menerima mahasiswa baru sejak tahun akademik 2001/2002, dan Fakultas Keperawatan mulai tahun akademik 2003/2004 menerima 100 mahasiswa baru.

Mulai tahun 2003/2004 ini UMM juga telah membuka program studi Pascasarjana yang terdiri dari Program Magister Agama, Magister Manajemen

dan Magister Sosiologi Pedesaan. Dan akan dikembangkan lagi dengan program studi baru yang disesuaikan dengan permintaan pasar terlebih dahulu melalui studi kelayakan.

Dari sisi jumlah mahasiswa, UMM termasuk PTS yang paling banyak menerima jumlah mahasiswa baru di kota Malang. Secara tidak langsung apa yang dilakukan oleh UMM untuk ikut membantu pemerintah di dalam proses mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan begitu aksesibilitas kebijakan pendidikan untuk memperoleh kesempatan pemerataan pendidikan di PT telah diakomodasi dengan baik oleh UMM.

#### **4.1.3.2. Produktivitas**

Dalam kurun waktu satu tahun akademik, UMM melaksanakan wisuda sebanyak 3 kali. Setiap kali wisuda diikuti oleh 1.400 wisudawan, dengan demikian UM pada tahun akademik 2002/2003 telah mewisuda sejumlah 4.200 lulusan. Dari tahun ke tahun selalu mengalami kenaikan jumlah lulusan atau produktivitasnya. Produktivitas dapat diartikan sebagai prosentase kelulusan yang dihitung relatif terhadap jumlah mahasiswa. Dengan begitu tingkat produktivitas UMM dapat mencapai angka diatas 30 %, perbandingannya ( 19.896 : 1400 ). Angka tersebut sudah melampaui produktivitas nasional yang ditetapkan oleh pemerintah sebesar 15 %.

Akan tetapi di dalam mencetak lulusannya, UMM telah melakukan terobosan semaksimal mungkin. Realitas ini ditandai dan dibuktikan dengan direkrutnya beberapa staf pengajar dari PTN dan PTS yang dipandang memiliki kapabilitas keilmuan yang memadai, kelompok mereka biasanya disebut sebagai dosen luar biasa. Meskipun secara bertahap jumlahnya akan selalu dikurangi. Hal inilah sekaligus sebagai bukti komitmen UMM sebagai PTS besar di Malang yang selalu

mengutamakan kualitas kelulusannya. Sebagai PTS memiliki tingkat produktivitas seperti dicapai UMM merupakan sebuah prestasi luas biasa. Dari 12 fakultas di UMM, Fakultas Ekonomi mempunyai tingkat produktivitas tertinggi, dapat mencapai angka sekitar 35 %, disusul kemudian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

#### **4.1.3.3. Staf Pengajar ( Dosen )**

Sedikitnya ada 400 orang staf pengajar atau dosen yang mengabdikan diri di UMM. Berbeda dengan Unibraw dan UM, di UMM status kepegawaian seorang dosen dibagi menjadi tiga, yaitu dosen kopertis, dosen yayasan dan dosen berstatus sebagai tenaga kontrak yang terinci sebagai berikut : 130 orang dosen kopertis, 243 orang dengan status dosen yayasan dan yang 27 orang sebagai tenaga kontrak

Untuk meningkatkan kualitas staf pengajar saat ini UMM masih memerlukan dosen luar biasa dari Unibraw dan dari UM. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kualitas dan kuantitas lulusan UMM. Biasanya dosen luar biasa tersebut memiliki keahlian tertentu serta dengan kualifikasi yang lebih dari pada dosen tetap. Satu prestasi patut untuk dicatat, UMM sudah memiliki seorang Guru Besar ( *Profesor* ), 20 orang dosen berpangkat lektor kepada dan sebanyak 137 orang berpangkat lektor. Prestasi baik ini sudah cukup bagus bagi ukuran sebuah PTS. Saat ini sedang disekolahkan beberapa orang dosen untuk studi lanjut ke jenjang strata 2 maupun strata 3.

Dari data-data tersebut terlihat betapa UMM selalu berusaha untuk meningkatkan SDM staf pengajarnya seiring dengan ketatnya persaingan baik antar sesama perguruan tinggi baik PTN dan PTS maupun persaingan tersebut

juga tengah terjadi di lapangan pekerjaan, seiring dengan era globalisasi maka kompetensilah sebagai dasar tolak ukur rekrutmen.

#### **4.2. Kebijakan Makro Pemerintah Di Bidang Pendidikan**

Sesuai dengan tema pokok dalam penelitian yang menyoroti masalah biaya masuk di PT, maka agar diperoleh suatu gambaran yang komprehensif tentang wajah PT di Indonesia, ditampilkan pula Kebijakan Makro Pendidikan Nasional, tentu saja yang berkaitan dengan masalah anggaran.

Karena PT masuk dalam jajaran wilayah Departemen Pendidikan Nasional, maka dalam paparan berikut akan disampaikan sampai sejauh mana dampak dari kebijakan anggaran pendidikan nasional yang bersifat dan berskala umum, umum dalam arti bahwa anggaran pendidikan diperuntukan untuk membiayai aktivitas departemen pendidikan di Indonesia dalam jangka waktu satu ( 1 ) tahun takwim. Dari pantauan penulis bahwa Anggaran Pendidikan Nasional tahun 2004 ini belum menunjukkan tanda-tanda yang memuaskan, bila dikaitkan dengan aksesibilitas masyarakat dalam memperoleh kesempatan. Gambaran riil anggaran pendidikan yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 15 Agustus 2003 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 15,2 triliun. Anggaran tersebut sudah termasuk anggaran sektor pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olah raga. Anggaran Pendidikan Nasional, yang didalamnya termasuk PT, hanya 4,12 % dari keseluruhan RAPBN ( Rencana Anggaran Pendapatan Negara ) tahun 2004 sebesar Rp. 343,9 triliun. Tentu angka tersebut relatif lebih kecil dibandingkan dengan bilangan ideal dalam UUD 1945 yang telah mengamanatkan besarnya anggaran pendidikan minimal 20 % dari APBN.

Implementasi Kebijakan Pendidikan Nasional yang termaktub dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang lebih dikenal

dengan UU Sisdiknas juga mengisyaratkan seperti nampak pada Pasal 49 Ayat (1) menyebutkan, dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan, dialokasikan minimal 20 persen dari pada APBN sektor pendidikan dan juga minimal 20 persen dari APBD, di daerah baik untuk Pemerintah Kota maupun untuk Pemerintah kabupaten. Kebijakan makro pendidikan seperti dalam (Tabel 1) dibawah ini merupakan kebijakan yang kurang aspiratif dan bersahabat terhadap dunia pendidikan. Bandingkan dengan luar negeri yang selalu menempatkan pos anggaran pendidikan sebagai yang terbesar, biasanya prosentasenya sedikit dibawah pos anggaran pertahanan – keamanan.

**Tabel 1**

**Kebijakan Makro Anggaran Pendidikan**

<b>Kebijakan Anggaran Pendidikan</b>	<b>Prosentase APBN</b>
UU Sisdiknas	20 %
UUD 1945	20 %
APBN 2003	4,12 %

*Sumber : Kompas, Agustus 2003*

Yang terekam dalam data, betapa tidak ada sinkronisasi antara kebijakan pemerintah ( APBN ) dengan yang telah di amanatkan dalam UUD dan UU Sisdiknas Dalam data-data tersebut, sebenarnya terlihat bahwa Kebijakan Pendidikan ( PT )

di Indonesia masih belum di upayakan dengan maksimal. Ke tiga kebijakan tingkat makro tentang pendidikan, tidak terjadi sinkronisasi. Jelas hal yang demikian ini berpengaruh kepada kinerja dari Depdiknas, tentu saja pada akhirnya berdampak pula kepada kinerja PT yang nota bene termasuk institusi dibawahnya. Meskipun tidak bebas biaya sekolah, akan tetapi pemerintah membantu mencarikan jalan keluar, misalnya di carikan bantuan bea siswa atau semacam kredit dari Bank yang baru dibayar setelah mahasiswa tersebut telah bekerja.

Kebijakan pendidikan yang berkaitan dengan kebijakan biaya pendidikan sebenarnya sudah pernah di implementasikan oleh pemerintah, sebut saja semisal Kebijakan JPS ( Jaring Pengaman Sosial ), juga GN OTA, dan yang kini sedang menjadi andalan yaitu bantuan subsidi BBM ( Bahan Bakar Minyak ), tetapi baik JPS, GN OTA, Subsidi BBM kebijakan tersebut lebih banyak terfokus kepada bantuan biaya pendidikan di tingkat Sekolah Dasar sampai Sekolah Menengah Umum, PT masih belum pernah di jamah oleh kebijakan tersebut.

Oleh karena anggaran pendidikan dalam APBN ditetapkan sebesar hanya 4,12 % maka dengan sendirinya kucuran biaya ke masing-masing unit kerja juga semakin kecil. Tidak saja hanya terjadi di Unibraw, UM maupun juga ( UMM ). Perguruan Tinggi yang lain juga mengalami nasib yang sama. Unibraw sendiri yang unit costnya per mahasiswa mencapai Rp. 9.000.000,- per tahun, sedangkan subsidi dari pemerintah hanya berkisar Rp. 4.500.000,- dan yang dari mahasiswa Rp. 1.000.000,- . Sama halnya di UM, unit cost per mahasiswa per tahun mencapai Rp. 7.000.000,-, subsidi dari pemerintah lewat APBN sebesar Rp. 3.500.000,- dan yang dari mahasiswa sebesar Rp.1.000.000,-. Kondisi di UMM lebih memprihatinkan, karena PTS subsidi diberikan oleh pemerintah relatif kecil, tidak lebih dari Rp. 500.000,- per mahasiswa. Tentu

saja pihak universitaslah harus mencari terobosan untuk menutup kekurangan tersebut, diantaranya dengan efisiensi pengeluaran. Sesuai dengan tema, maka apapun dilakukan oleh PT dengan bermacam cara, yang terpenting proses pendidikan harus tetap berjalan. Aksesibilitas pendidikan harus tetap dilakukan karena mengingat keterpurukan di segala bidang sedang melanda bangsa ini, maka satu jawabannya pasti yaitu meningkatkan kualitas pendidikan Besar Anggaran Pendidikan dalam APBN yang hanya 4,12 % merupakan anggaran pendidikan terkecil bila harus diperbandingkan dengan anggaran berbagai negara dimanapun.

### **4.3. Aksesibilitas Masyarakat Untuk Memperoleh Pendidikan Tinggi**

#### **4.3.1. Kebijakan Biaya Masuk di Unibraw**

Unibraw pada tahun 2003 ini dalam seleksi penerimaan mahasiswa baru menggunakan 4 ( empat ) pola, yaitu : ( 1 ) *Pola Penerimaan Siswa Berprestasi ( PSB )*; ( 2 ) *Pola Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru ( SPMB atau UMPTN ) Program Reguler Strata ( S 1 )*; ( 3 ) *Pola Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru ( SPMD ) Program Diploma ( D III )*, ( 4 ) *Pola Seleksi Mahasiswa Baru ( SPMK ) Program Minat Dan Kemampuan S 1*.

Pada masing-masing program dalam seleksi penerimaan mahasiswa baru memiliki persyaratan administrasi sendiri-sendiri, tetapi yang di analisis untuk di evaluasi adalah tentang kebijakan yang berkaitan dengan besar jumlah biaya masuk ke Unibraw melalui jalur Program Reguler, Diploma dan Program Ekstensi.

##### **4.3.1.1. Program Reguler**

Kebijakan penetapan biaya masuk bagi mahasiswa baru *Program Reguler ( S 1 )* di Unibraw pada tahun akademik 2003/2004 seperti yang termaktub dalam Pengumuman Nomor : 004 / Peng / 2003, ( Lampiran 1 ).

Sedangkan secara eksplisit di dalam Pengumuman Rektor Nomor 004 / Peng / 2003 Tanggal 19 Juli 2003 itu yang tidak lain adalah juga Kebijakan Rektor tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Reguler Srtata 1 ( S 1 ), dilengkapi dengan beberapa persyaratan diantaranya : Menunjukkan STT, Raport dan Nilai Ujian Akhir Nasional / Surat Tanda Kelulusan asli serta menyerahkan foto kopinya masing-masing 1 lembar, dan lain sebagainya. Beberapa persyaratan tersebut diperuntukan bagi Mahasiswa Baru Unibraw hasil seleksi penerimaan melalui jalur SPMB dan PSB ( Penerimaan Siswa Berprestasi ).

#### **4.3.1.2. Program Diploma**

Pada tahapan seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru, Unibraw disamping menggunakan pola penerimaan jalur program reguler ( S 1 ) juga menggunakan pola jalur seleksi Program Diploma ( D 1, D 3 dan D 4 ) serta Program Minat dan Kemampuan ( SPMK ). Untuk Program Diploma terdapat suatu perbedaan yang signifikan dengan jalur Program Reguler. Program Diploma adalah program seleksi penerimaan yang dilakukan sendiri oleh pihak Unibraw, mulai dari pendaftaran sampai dengan pengumuman penerimaan mahasiswa baru. Lulusan program diploma nantinya dapat pindah ( transfer ) ke program strata satu reguler, tentu melalui seleksi dan persyaratan khusus.

Oleh karena itu, pada akhir-akhir ini program diploma peminatnya juga cenderung mengalami kenaikan yang cukup berarti, tetapi khusus tahun 2003 jumlah peminat peserta test program ini mengalami penurunan yang ber arti. Disinyalir penurunan jumlah peserta calon mahasiswa baru program ini lantaran mengingat besar jumlah biaya masuk mengalami kenaikan yang cukup tajam, berbeda dengan kebijakan pada tahun-tahun sebelumnya. Meskipun ada anggapan bahwa program diploma saat ini kalah bersaing dengan program SPMK dari

sisi jumlah peserta test, tetapi perkiraan tersebut tanpa di dukung oleh hasil penelitian. Untuk lebih jelas berapa jumlah biaya masuk Program Diploma di Unibraw pada tahun 2003/2004, lihat dalam ( Lampiran 2 ). Seperti pada Program Reguler, Sistem Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Program Dipoma mengacu pada Pengumuman Rektor harus dengan beberapa persyaratan antara lain : WNI, WNA ijin Dikti, SMU/SMK/MAN, dan lain sebagainya.

Persyaratan-persyaratan tersebut ditujukan bagi para calon peserta test ujian masuk Program Diploma Unibraw yang biasanya waktu pelaksanaannya dibuka sampai hasil seleksi penerimaan SPMB diumumkan, sehingga dengan demikian Program Diploma memberi kesempatan kepada lulusan SMU yang tidak diterima di salah satu universitas melalui jalur SPMB. Khusus tahun ini Program D 3 mengalami penurunan yang tajam dari jumlah peserta.

#### **4.3.1.3 Program Minat dan Kemampuan**

Selaksi Program Minat dan Kemampuan ( SPMK ) merupakan pola seleksi ketiga dari jalur test tulis, termasuk jalur seleksi ke empat bila jalur PSB diperhitungkan. Analisis dalam tulisan ini dibatasi hanya mengkaji ke tiga pola seleksi yaitu SPMB, SPMD dan SPMK.

Seperti SPMB dan SPMD, biaya masuk bagi mahasiswa baru pada program ini di tetapkan melalui pengumuman Rektor, biaya dan persyaratan seperti yang tercantum dalam pengumuman, perlu untuk diketahui bahwa kebijakan biaya masuk pada program SPMK mengalami kenaikan yang jumlahnya cukup signifikan. Bisa saja terjadi hal ini karena mulai tahun ini beberapa PTN papan atas di negeri ini seperti ( UI, ITB, UGM dan IPB ) telah berubah status menjadi PT BHMN. Akan tetapi PT diluar ke empat PT tersebut masih belum berubah status, kepastian kebijakan tentang perubahan status itu belum dikeluarkan

oleh pemerintah. Depdiknas saat ini hanya memberikan izin kepada ke empat PTN. Tetapi dalam perjalanannya, tidak sedikit PTN yang ikut-ikutan latah berkeinginan secepatnya untuk berubah status. Menurut kajian peneliti, sebenarnya biarkan saja PTN papan atas tersebut mencoba berbenah, namun PTN-PTN di luar ke empat PTN papan atas tidak perlu ikut-ikutan, hal ini dikarenakan masih banyak masyarakat di Indonesia ini yang masih dibawah garis kemiskinan. Perubahan status tersebut membawa dampak menaiknya biaya pendidikan beberapa kali lipat.

SPMK merupakan penjelmaan nama dari program ekstensi ini sejatinya diperuntukan bagi calon mahasiswa baru yang ber status sudah bekerja, namun dalam perjalanannya berikutnya tidak sedikit calon mahasiswa yang dari lulusan Sekolah Menengah Umum (*fresh study*). Jumlah peminatnya cukup besar karena program ini tidak banyak bedanya dengan program reguler hasil dari seleksi SPMB. Sama seperti halnya dengan SPMD, program ini juga dikelola sendiri oleh masing-masing PT, tanpa ada upaya melibatkan pemerintah pusat atau Depdiknas. Untuk lebih memperjelas, tersebut dibawah ini diberikan gambaran jumlah besar biaya masuk program SPMK seperti dalam (Lampiran 3).

Kebijakan biaya masuk program SPMK khususnya biaya SPFP mengalami kenaikan cukup besar dibanding beberapa tahun-tahun sebelumnya, sehingga jatuhnya jumlah keseluruhan yang harus dibayar oleh mahasiswa baru semakin besar. Dalam ringkasan dibawah yang disajikan dalam bentuk (Tabel 2) Kebijakan Biaya Masuk di Unibraw Program Reguler, Diploma dan SPMK, seperti berikut :

Tabel 2

## Kebijakan Biaya Masuk di Unibraw Tahun 2003

Program	Biaya ( Rp. )	Keterangan
Reguler	1.865.000,-	-
Diploma	4.315.000,-	Fak Ilmu Adm.
SPMK	5.265.000,-	Fak Ilmu Adm.

Sumber : Pengumuman Penerimaan Mahasiswa Baru Unibraw

#### 4.3.2. Kebijakan Biaya Masuk di UM

Seperti halnya Unibraw, UM juga menggunakan tiga jalur, disamping jalur pola PMDK untuk tahun ajaran baru ini, yaitu, *Jalur Reguler*, *Jalur Khusus* dan *Jalur PABTI (Pendidikan Aplikasi dan Teknologi Informasi)*.

##### 4.3.2.1. Program Reguler

Kebijakan tentang penetapan biaya masuk program reguler di UM didasarkan pada Pengumuman Nomor : 061 / J36.II / KU / 2003, Tanggal 20 Mei 2003 yang ditanda tangani oleh Pembantu Rektor Bidang Administrasi Keuangan ( PR II ). Dalam menentukan kebijakan tersebut, PR II sudah menkonsultasikan kepada segenap jajaran pimpinan UM, jadi kebijakan tersebut sudah melalui proses *bottom up*, sedangkan macam tarikan sumbangan di UM terdiri dari : Sumbangan Pembinaan Pendidikan ( SPP ), Sumbangan Pembinaan Sarana Akademik ( SPSA ), Dana Kegiatan Penerimaan Mahasiswa Baru ( DKPMB ), Kegiatan Hotma, dan Jaket Alamamater, yang secara rinci dapat dilihat pada ( Lampiran 4 ).

#### 4.3.2.2. Program Kelas Khusus

Untuk tahun akademik 2003, UM mulai membuka kesempatan bagi calon mahasiswa baru melalui sistem penerimaan program kelas khusus. Jalur ini pada prinsipnya hampir sama, baik mengenai persyaratan pembayarannya sampai kepada materi test ujiannya, membedakan hanya pada besar jumlah pembayaran, meliputi diantaranya, Biaya Penyelenggaraan Pendidikan ( BPP ), Sumbangan Pembinaan Sarana Akademik ( SPSA ), Dana Kegiatan Penerimaan Mahasiswa Baru ( DKPMB ), kegiatan HOTMA, dan Biaya Jacket Almamater. Seleksi penerimaan program jalur ini sudah di bicarakan di tingkat pimpinan UM. Lebih jelas dapat dilihat berapa besar jumlah biaya masuk mahasiswa baru dari jalur ini seperti dalam ( Lampiran 5 ).

Dalam tahun akademik 2003/2004 UM, disamping menerima mahasiswa baru dengan melalui dua jalur tersebut. Pimpinan UM juga memutuskan untuk menerima mahasiswa baru program 1 tahun, yang diberi nama PABTI, atau Pendidikan Aplikasi Bisnis dan Teknologi Informasi. Program ini tidak termasuk rana penelitian, karena sejak semula penelitian ini hanya di lakukan pada jenjang Strata 1 atau delapan semester, otomatis termasuk pula jenjang diploma dan juga pascasarjana. Di Unibraw tahun ini juga membuka program satu tahun, tetapi program ini tidak dijadikan sebuah penelitian. Program satu tahun baik yang ada di Unibraw maupun UM berbeda dengan Program Diploma satu ( D 1 ). Biasanya program satu tahun ini lebih bersifat ke kursus langsung aplikatif.

Sedangkan kebijakan biaya masuk mahasiswa baru di UM, baik yang ber asal dari program reguler maupun program khusus, disajikan dalam bentuk ( Tabel 3 ), sebagaimana dibawah ini :

**Tabel 3****Kebijakan Biaya Masuk di UM 2003**

<b>Program</b>	<b>Biaya ( Rp )</b>
<b>Reguler</b>	<b>1.655.000,-</b>
<b>Khusus</b>	<b>2.555.000,-</b>

*Sumber : Pengumuman Penerimaan Mahasiswa Baru UM*

**4.3.3. Kebijakan Biaya Masuk di UMM**

Kebijakan Rektor UMM tentang biaya masuk mahasiswa baru berdasarkan keputusan Rektor tahun akademik 2002/2003, mengingat saat dilakukan penelitian, penetapan biaya masuk ke UMM bagi mahasiswa baru belum selesai, tetapi dengan melihat dan meneliti tahun yang lalu dianggap sudah mencukupi dan mewakili, mengingat penelitian ini melihat sampai sejauh mana jumlah besaran biaya yang ditetapkan. Ada sedikit perubahan, tetapi jumlahnya juga tidak terlalu banyak, selisihnya diperkirakan bekisar antara 500 ribu sampai 1 juta rupiah. Untuk UMM macam jenis tarikannya tidak terlalu variatif, hanya terdiri dari DPP ( Dana Penunjang Pendidikan ) dan SPP ( Sumbangan Pembinaan Pendidikan ). Untuk fakultas dipilih jurusan yang paling banyak memungut biaya, dan untuk DPP dipilih pada gelombang 1 ( di UMM ada gelombang 1 dan 2 ). Lebih rinci, biaya masuk mahasiswa baru UMM, dapat disimak pada ( Tabel 4 ).

Kebijakan biaya masuk di UMM hampir pasti dari tahun ke tahun tidak pernah terjadi lonjakan, hanya di Fakultas Kedokteran yang mengalami kenaikan cukup tajam, tetapi kenaikan biaya masuk tersebut lebih dikarenakan kebutuhan

biaya kuliah di fakultas tersebut memang mahal, dan kebijakan biaya masuk Fakultas Kedokteran mengikuti perkembangan yang telah ada. Tidak saja terjadi hanya di UMM, di beberapa PT yang memiliki Fakultas Kedokteran menetapkan kenaikan biaya masuk sebesar 50 % dari tahun sebelumnya. Kenaikan tersebut tengah terjadi di berbagai PTN dan PTS. Memang secara kalkulasi Fakultas Kedokteran berbeda dengan fakultas yang lain, dan tentu saja penelitian dan bahasan pada tulisan ini di luar fakultas tersebut. Sedangkan fakultas lain di luar Fakultas Kedokteran tidak mengalami kenaikan, hal ini dilakukan karena mengingat betapa kondisi masyarakat Indonesia yang masih sangat memprihatinkan.

UMM juga telah memiliki Fakultas Keperawatan yang penetapan kebijakan biaya masuknya agak sedikit berbeda dengan fakultas yang lain. Besar jumlah biaya yang harus dibayar melebihi fakultas lain, mengingat Fakultas Keperawatan memerlukan praktek laboratorium yang banyak memerlukan alat-alat dan obat-obatan yang cukup mahal. Untuk keperluan praktek fakultas keperawatan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, hal ini dimaksudkan untuk mempermudah mahasiswa dalam melakukan kegiatan praktek kerja perawatan seperti di rumah sakit, serta untuk melaksanakan praktikum laboratorium. Jaringan kerjasama tersebut tidak hanya sebatas pada rumah sakit di lingkungan intern Muhammadiyah saja, dengan beberapa rumah sakit pemerintah juga sedang dijajaki. Disamping itu tujuan strategis lainnya dengan dibukanya program studi ini sebagai antipasi permintaan bursa tenaga kerja di sektor ini. Akhir-akhir ini permintaan tenaga kerja di bidang keperawatan cukup besar, tidak saja permintaan tersebut datang dari dalam negeri, yang ber asal dari luar negeri permintaan tenaga kerja di sektor ini juga semakin banyak jumlahnya, tentu ini bertanda baik dari segi pemenuhan lapangan kerja..

Rasa optimis tercermin dari jajaran Pimpinan Rektorat UMM terhadap masa depan Fakultas Keperawatan, sejak didirikan beberapa tahun yang lalu grafik kenaikan jumlah mahasiswa baru mengalami kenaikan yang berarti. Bahkan Fakultas Keperawatan sekarang telah menjadi salah satu fakultas andalan, disamping Fakultas Kedokteran. Dari data yang ada juga menunjukkan bahwa permintaan bursa tenaga kerja di bidang keperawatan semakin meningkat dari tahun ke tahun.

Sedang dijajaki kerjasama dengan berbagai pihak di luar negeri khususnya di negara-negara jazirah Arab, seperti Arab Saudi, Kuwait, Qatar, untuk menampung para lulusan perawat dari UMM. Dan kenyataannya peluang tenaga kerja di bidang keperawatan saat ini sedang terbuka lebar. Satu hal yang patut untuk ditelaah lebih dalam oleh para calon mahasiswa bahwa profesi sebagai perawat hingga kini masih sangat menjanjikan. Peluang inilah sebenarnya yang mengilhami *stakeholders* di UMM saat buka program studi keperawatan ini.

Tabel 4

**Kebijakan Biaya Masuk di UMM Tahun 2002/2003**

<b>F a k u l t a s</b>	<b>D P P</b>	<b>S P P per smt</b>	<b>Jumlah</b>
Agama Islam	1.100.000,-	700.000,-	1.800.000,-
FKIP	3.250.000	700.000,-	3.950.000,-
FISIP	4.000.000,-	700.000,-	4.700.000,-
Hukum	3.000.000,-	700.000,-	3.700.000,-
Ekonomi	4.000.000,-	700.000,-	4.700.000,-
Psikologi	4.000.000,-	700.000,-	4.700.000,-
Pertn – Perikn	2.300.000,-	700.000,-	4.000.000,-
Pertanian	2.300.000,-	700.000,-	4.000.000,-
Teknik	4.100.000,-	700.000,-	4.800.000,-
Kedokteran	25.000.000,-	4.000.000,-	29.000.000,-
Keperawatan	3.500.000,-	1.000.000,-	4.500.000,-
Pascasarjana			3.000.000.-

*Sumber : Pengumuman Penerimaan Mahasiswa Baru UMM*

Khusus untuk UMM, seleksi penerimaan di konversi hanya menjadi satu jalur, tanpa ada jalur program diploma, ekstensi, kelas khusus, dllsb. seperti yang dilakukan Unibraw dan UM. Akan tetapi, hasil penelitian ini tidak akan terpengaruh, karena substansi pembahasannya kebijakan rektor tentang biaya masuk di PT. Untuk lebih dapat memberikan arah pemahaman, sesuai dengan substansi penelitian, maka dibawah ini akan diinventarisasi kebijakan biaya masuk dari ke tiga universitas, Unibraw, UM dan UMM dengan

melalui sampling satu fakultas yang diharapkan dapat merepresentasikan kebijakan masuk dari ke tiga universitas tersebut. Melalui proses inventarisasi dengan mempertimbangkan faktor kisaran jumlah maka dibawah ini akan di tampilkan perbandingan kebijakan biaya masuk di ke tiga PT, yaitu Unibraw, UM dan UMM seperti dibawah ini, lihat ( Tabel 5 ):

**Tabel 5**

**Perbandingan Kebijakan Biaya Masuk di Unibraw, UM dan UMM**

<b>Universitas</b>	<b>Jumlah Biaya Masuk</b>	<b>Keterangan</b>
<b>Unibraw</b>	<b>Rp. 5.265.000,-</b>	<b>Prog. SPMK</b>
<b>U M</b>	<b>Rp. 2.555.000,-</b>	<b>Prog. Khusus</b>
<b>U M M</b>	<b>Rp. 4.800.000,-</b>	<b>Fak. Teknik</b>

*Sumber : Pengumuman Biaya Masuk di Unibraw, Um, UMM*

#### **4.4. Dampak Kebijakan Biaya Masuk PT**

Pada setiap kebijakan selalu diharapkan dapat memberikan dampak tertentu seperti yang telah direncanakan sebelumnya. Demikian pula halnya dengan Kebijakan Biaya Masuk di PT diharapkan dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk dapat memperoleh kesempatan pemerataan pendidikan tinggi tanpa harus terhambat dengan berbagai persoalan masalah biaya. Dengan begitu selanjutnya yang lebih diharapkan adalah masyarakat dapat mengakses untuk masuk ke PT, yang tentunya saja dapat menaikkan angka partisipasi masyarakat

Indonesia ke PT. Angka partisipasi yang mungkin dapat dicapai oleh Indonesia baru 13 %, demikian menurut ( Effendi, 2003 ), bandingkan dengan beberapa negara, sebut saja seperti Malaysia , yang sudah dapat mencapai angka partisipasi 38 %, dimana Malaysia pada tahun 1990 masih belajar ke Indonesia bagaimana mengelolah sebuah PT.

Untuk dapat memberikan arah pemikiran, bagaimana Kebijakan Biaya Masuk PT apa dapat di akses oleh masyarakat pada umumnya, untuk itu penelitian di lapangan juga melibatkan masyarakat dari siswa Sekolah Menengah Umum ( SMU ) yang dengan terpaksa tidak dapat melanjutkan studi ke PT hanya karena persoalan masalah biaya. Penelitian di lakukan dengan purposive kepada 5 siswa dari lima wilayah di daerah Malang. Dibawah ini hasil petikan wawancara dengan 5 siswa protolan lulusan SMU yang dikemas dalam bentuk wawancara langsung, sebagai berikut :

1. M. Munif, warga Tlogomas, siswa MAN Malang

Munif demikian dia dipanggil, sewaktu di sekolah termasuk siswa yang cukup pandai, terbukti dari Nilai raport dari kelas 1 sampai kelas 3. Tidak dapat melanjutkan studi lanjut ke PT merupakan sesuatu yang sangat tidak diinginkan, citi-cita nya yang ingin menjadi seorang arsitektur harus dikubur dalam-dalam. Dengan terpaksa Ia tidak melanjutkan kuliah karena harus bekerja menjadi Satpam, berikut hasil wawancaranya :

“Bekerja jadi satpam ini terpaksa harus saya lakukan karena membantu ekonomi keluarga, Bapak saya yang hanya tukang batu sudah terlalu tua untuk bekerja keras menghidupi seorang istri dengan 4 orang anak. Oleh karena dengan terpaksa saya harus bekerja, meskipun jadi satpam, yang tidak pernah saya cita-citakan sebelumnya”. (wawancara pada 10 April 2003 ).

2. Diah Arianti, mantan siswa SMU N Tumpang Malang.

Diah, demikian ia biasa dipanggil, harus membantu Ibunda berjualan kue di pasar Tumpang, karena Bapaknya sudah meninggal beberapa tahun lalu. Cita-citanya yang ingin jadi dokter terpaksa ditangguhkan karena harus melihat keadaan ekonomi keluarga. Dibawah ini rangkuman dari wawancara :

“Ya begini ini Pak tiap hari saya harus bangun pagi untuk membantu Ibu menyiapkan bahan-bahan untuk dibuat kue, dan setelah itu dijual ke pasar, ya kalau pas rezeki dagangan bisa habis, akan tatapi juga sering beberapa buah kue terpaksa dibawa pulang karena tidak laku. Saya harus membantu Ibu, karena sebagai anak tertua saya relakan diri saya untuk sekolah sampai lulus SMU saja, soalnya memberi kesempatan adik-adik yang semua masih sekolah dan butuh dan yang tidak sedikit”. (wawancara pada 10 April 2003).

3. Purnomo, lulus salah satu SMU di Batu tahun 2002.

Dengan berat hati sekali sebenarnya Dia harus menganggur, tidak mampu untuk melanjutkan kuliah di PT, karena orang tuanya yang tukang ojek tentu tidak mampu lagi membiayai. Inilah hasil wawancaranya :

“Sambil mengisi waktu luang saya, biasanya saya gunakan untuk memberi les privat kepada beberapa siswa Sekolah Dasar di sini Pak. Lumayan Pak hasilnya saya berikan kepada orang tua untuk keperluan sehari-hari. Karena Bapak yang tukang ojek itu kasihan kalau harus membanting tulang untuk mencari nafkah keluarga dan membiayai kuliah saya, lebih baik saya yang mengalah agar beban keluarga terutama Bapak tidak terlalu berat”. (wawancara pada 5 Mei 2003).

4. Siti Muslikhah, tamatan SMU swasta di Kapanjen Malang.

Bapaknya yang hanya tukang becak terlalu berat bagi Dia bila setamat SMU harus melanjutkan kuliah di PT. Meskipun hasratnya besar untuk dapat sekolah yang lebih tinggi lagi. Dia sadar orang tuanya tidak mungkin punya cukup uang untuk membiayainya. Wawancara dibawah ini dilakukan di rumahnya yang sederhana.

‘Beberapa sih Pak pendapatan sebagai Tukang Becak di daerah kecil seperti Kepanjen ini. Sejak kecil Lika sebenarnya ingin menjadi Insinyur Pertanian, hanya saja Dia sadar kemampuan ekonomi orang tuanya tidak mendukung. Dengan terpaksa akhirnya Lika harus bekerja di pabrik, tidak melanjutkan lagi sekolah’. ( wawancara pada 5 Mei 2003 ).

5. Sugiarto, putra pertama dari 3 bersuadara ini Tamat SMU di Lawang Malang Sebagai karyawan Buruh Petik Teh di Perkebunan Teh Wonosari Lawang itu lah pekerjaan sehari – harinya orang tua Sugiarto. Sebagai karyawan tidak tetap atau kontrak di Perkebunan ini, meskipun sudah bekerja selama 10 tahun akan tetapi sampai saat ini masih digolongkan sebagai pegawai tidak tetap dengan gaji kontrak.

‘Keluh kesahnya seperti yang disampaikan dalam wawancara, menurut Sugiarto, mestinya berkeinginan sekali dapat meneruskan sampai ke jenjang PT, akan tetapi apa mungkin kehidupan orang tua saya yang hanya cukup dimakan, itupun tidak sampai satu bulan. Karena itu rasanya tidak tega melihat Bapaknya yang harus membanting tulang untuk mencari tambahan lain, padahal di lingkungannya Dia tinggal, tidak mungkin untuk menyambi mencari pekerjaan lainnya’, begitulah pengakuan Sugiarto yang dituturkan dengan polos itu”. ( wawancara pada 9 Juni 2003 ).

Demikian hasil wawancara yang di lakukan di ke lima ( 5 ) wilayah di Malang yang terdiri dari wilayah Malang bagian barat, timur, utara, selatan dan tengah kota Malang, representasi mereka diharapkan dapat mewakili masyarakat di daerah Malang secara keseluruhan.

Untuk lebih memperjelas, hasil penelitian dilengkapi dengan data di lapangan kepada lima orang yang berprofesi sebagai tenaga kasar telah bekerja di lapisan masyarakat pada level paling bawah, ternyata golongan ini di Indonesia paling banyak jumlahnya, mendekati angka 70 % dari keseluruhan penduduk Indonesia, ( Kompas, 2003 ). Pemetakan golongan tersebut juga dilengkapi dengan tingkat penghasilan rata-rata per bulan, ukuran per bulan merupakan standarisasi yang sering dijumpai / digunakan untuk mengukur tingkat pendapatan masyarakat.

Menginterpretasi penghasilan masyarakat dari hasil penelitian berkorelasi positif dengan Upah Minimum Regional di Jawa Timur yang ditetapkan sebesar lebih kurang Rp. 650.000,- per bulan. ( Jawa Pos, 2003 ). Oleh karena itu hasil penelitian ini kiranya cukup signifikan untuk dapat digeneralisasi. Berapa besar rata-rata penghasilan masyarakat di Jawa Timur atau di Indonesia pada umumnya, dapat lihat ( Tabel 6 ) sebagai berikut :

**Tabel 6**

**Pemetakan Penghasilan Masyarakat Di Wilayah Malang**

<b>Pekerjaan</b>	<b>Penghasilan / bln</b>	<b>Keterangan</b>
Tukang Batu	750.000,-	Pendapatan Rata2 Per – bulan
Jual Kue di Pasar	700.000,-	Idem
Tukang Ojek	800.000,-	Idem
Mengayu Becak	700.000,-	Idem
Buruh Tani	750.000,-	Idem

*Sumber : Informan dari Lapangan*

Upaya pemerintah di dalam rangka mencapai pada pemerataan akses yaitu pemerintah membangun berbagai fasilitas pendidikan seperti universitas, sekolah menengah umum, perpustakaan, laboratorium, dllsb. Fasilitas pendidikan sebenarnya tidak hanya dibangun oleh pemerintah, tetapi partisipasi pihak swasta terhadap

pembangunan di bidang pendidikan juga sangat besar dengan maksud agar terjadi akselerasi proses pembangunan pendidikan dapat dilakukan dengan berdaya guna dan berhasil guna.

Saat ini hampir pada setiap propinsi, kota maupun kabupaten telah dibangun universitas oleh pemerintah dan swasta yang tidak lain bertujuan agar pendidikan dapat menyentuh masyarakat sampai ke pelosok-pelosok daerah dengan demikian maka pemerataan pendidikan sampai ke jenjang PT dapat di akses dengan mudah.

Dengan dibangunnya beberapa universitas oleh pemerintah dan swasta ternyata dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh semua lapisan masyarakat. Oleh sebab itu pemerintah (*stakeholders*) mempunyai otoritas dalam membuat kebijakan-kebijakan intern universitas yang berkaitan dengan kebijakan biaya masuk. Pemerintah (PTN) dan swasta (PTS) dalam kapasitasnya sebagai organisasi publik dalam memformulasikan kebijakan harus selalu mengedepankan kepentingan publik

Dalam rangka untuk mencapai tujuan sasaran pada kualitas out put, maka kebijakan-kebijakan pemerintah harus mendukung ke arah keberhasilan pendidikan. Intervensi pemerintah terutama dari segi dana dan pengawasan memegang peranan penting untuk mencapai pada tingkat keberhasilan pendidikan yang ber orientasi pada kualitas *out put*.

Bentuk intervensi ini diantaranya adalah besarnya alokasi dana yang diberikan oleh pemerintah kepada dunia pendidikan. Anggaran yang disediakan oleh pemerintah untuk penyediaan pendidikan di universitas, di sekolah-sekolah dan di lembaga lainnya sangatlah amat terbatas, yang alokasi penggunaanya lebih besar ke arah sarana pembangunan fisik atau gedung. Sedangkan

alokasi anggaran untuk suatu institusi pendidikan diperlukan dana yang sangat besar, tuntutan obyektif selama ini menunjukkan bahwa biaya operasional untuk penyediaan pendidikan tidak kecil.

Dengan alokasi anggaran pemerintah dan tuntutan terhadap biaya teknik operasional yang semakin tinggi, maka prinsip efisiensi harus menjadi prioritas utama dalam pengelolaan pendidikan dari para *stakeholders*. Upaya ini antara lain yaitu dengan mengimplementasikan kebijakan pendidikan yang proporsional. Kebijakan pendidikan dalam hal ini adalah kebijakan biaya masuk harus benar-benar yang dapat dijangkau oleh golongan ekonomi kelas bawah.

Dampak dari kebijakan biaya masuk di Unibraw, UM dan UMM perlu menyesuaikan dengan keadaan ekonomi masyarakat. Sesuai dengan GBHN dan UUD 1945 bahwa negara menjamin pendidikan bagi setiap warga negara. Oleh karena itu maka kebijakan pendidikan dalam hal ini kebijakan biaya masuk di Unibraw, UM dan UMM harus dapat di akses oleh masyarakat, khususnya masyarakat di wilayah Malang.

Kosep aksesibilitas, oleh Achmady (1994) dijelaskan terdiri dari tiga aspek, yaitu : (1) aspek persamaan kesempatan (*equality of opportunity*), (2) aspek aksesibilitas (*accessibility*), dan (3) aspek keadilan (*equity*). Dan untuk keperluan pembahasan penelitian ini penulis mencoba menganalisis aksesibilitas dapat diartikan sebagai : *kemampuan* dan *kesempatan*. Artinya kemampuan dan kesempatan seseorang atau masyarakat untuk memperoleh kesempatan pemerataan pendidikan. Kemampuan dan kesempatan disini berkaitan dengan masalah struktur kondisi masyarakat. Lebih jauh dapat didefinisikan bahwa kemampuan dan kesempatan berkaitan dengan kecukupan atau kelebihan dari penghasilan masyarakat untuk biaya pendidikan, khususnya biaya

masuk ke PT. Tetapi sebaliknya, apabila penghasilan atau pendapatan masyarakat itu tidak mencukupi untuk biaya pendidikan, maka yang demikian itu dikatakan sebagai sesuatu yang kurang mampu ( miskin ). Atau dengan bahasa lain dampak kebijakan biaya masuk itu tidak ada akses di masyarakat.

Birokrasi perizinan untuk mendirikan PT baru masih mengutamakan muatan fungsi kontrol pemerintah terhadap PT, belum menunjukkan keterkaitan dengan tujuan pemerataan kesempatan. Perizinan masih memerlukan mata rantai prosedur cukup panjang dan dengan biaya yang cukup berarti. Ketentuan-ketentuan perizinan masih belum mengindikasikan inisiatif untuk memacu pendirian PT. Demikian juga dengan ketentuan tentang perluasan lingkup operasi PT yang telah ada, hanya untuk memperbesar daya serap PT, masih belum selaras dengan tujuan pemerataan kesempatan.

Sistem penerimaan mahasiswa baru ditentukan sekali dalam setahun juga membatasi daya serap PT dengan sendirinya membatasi pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan tinggi. Jika penerimaan mahasiswa baru bisa dilakukan per semester, kemungkinan calon peserta didik untuk masuk PT semakin besar dan tentu akan meningkatkan daya serap PT.

Pada akhir-akhir ini, PTN banyak menyelenggarakan program baru baik program ekstensi maupun program diploma. Banyaknya peminat yang ingin masuk dalam program ini merupakan gambaran adanya permintaan cukup tinggi dari kalangan masyarakat. Tetapi sangat disayangkan motif penyelenggaraan program ini terutama program ekstensi, bukan semata-mata untuk memberikan kesempatan lebih luas kepada seluruh lapisan anggota masyarakat yang ingin memasuki PT, tetapi lebih dikarenakan untuk kepentingan para *stakeholders* PT. Seandainya motivasi penyelenggaraan program-program ini untuk memperluas kesempatan berpartisipasi

pada PT jauh lebih baik dan begitulah yang memang diharapkan oleh kebanyakan masyarakat.

#### **4.5. Persepsi Kelompok Sasaran ( target group ) dan Para Aktor**

Untuk mendukung pembahasan hasil penelitian ini juga dilengkapi dengan berbagai pendapat, diantaranya bagaimana pandangan dari para tokoh masyarakat atau target group mempunyai relevansi kuat dengan dunia pendidikan. Disamping itu bagaimana pula pendapat dari para aktor yang berkompeten kepada masalah kebijakan biaya masuk di PT. Untuk wakil aktor, dipilih dari kelompok lingkungan pimpinan di tiga universitas ( Unibraw, UM dan UMM ). Penelitian dilakukan dengan cara wawancara langsung dan dengan melalui telepon, berikut dibawah ini hasil petikan dari wawancara tersebut :

*Pertama dari Prof. Drs. Sofyan Aman, SH*

Pakar pendidikan dan Rektor IKIP Budi Utomo Malang ini berpendapat bahwa, kebijakan biaya masuk PT baik negeri maupun swasta terkesan dipaksakan, mestinya hal ini dilakukan bertahap, tentu saja yang demikian ini cukup memberatkan masyarakat yang memasukan putra-putrinya ke jenjang PT, wawancara dilakukan via telepon pada 8 Juli 2003.

“Kalau toh pun PT berkeinginan untuk menaikan pungutan kepada mahasiswa baru hendaknya hal tersebut dilakukan dengan cara bertahap, dan jangan sampai didasari oleh karena ikut-ikutan PT lain. Betapa pentingnya suatu pendidikan bagi sebuah bangsa, oleh karena itu rumusan pendidikan harus dapat di akses oleh kebanyakan masyarakat. Peran dan perhatian pemerintah juga penting, karena pada dasarnya sebenarnya pendidikan termasuk urusan dan hak mutlak dari pemerintah”.

*Kedua, Roy Mastur*

Wartawan RRI Malang ini terang-terangan mengkritik habis kebijakan biaya masuk yang merebak pada tahun ini. Kekuatiran Roy dipicu, ternyata

masih banyak warga masyarakat Indonesia yang masih berada di bawah garis kemiskinan. Keyakinan Roy ini didasarkan dari pengamatan langsung di lapangan saat mencari berita ke daerah-daerah. Isi wawancara pada tanggal 10 Juli 2003 adalah sebagai berikut :

“Ternyata banyak masyarakat yang mengeluh kepada saya karena tidak mampu lagi membiayai anaknya kuliah di PT. Apalagi mulai tahun ini sepertinya PT itu sudah tidak mau lagi tahu terhadap kondisi masyarakat. Seharusnya sebelum menentukan kebijakan biaya masuk itu dilakukan lebih dahulu penelitian tentang kemampuan masyarakat. Saya prediksi untuk tahun ini jumlah calon mahasiswa maupun mahasiswa baru yang mengundurkan diri jumlahnya pasti akan berkurang jika dibandingkan dengan tahun lalu”.

*Ketiga, Prof. Dr.Ir. Yogi Sugito*

Pembantu Rektor I Unibraw ini sebenarnya agak ragu saat akan mengimplementasikan kebijakan biaya masuk pada tahun ini. Akan tetapi karena sudah menjadi keputusan bersama atau tim, maka Prof. Yogi pada akhirnya tidak kuasa untuk mencabut keputusan tersebut. Ikuti urainnya dalam salah satu wawancara pada 13 Juli 2003 :

“Berat sebenarnya untuk di realisasikan kebijakan biaya masuk PT yang pada tahun ini sudah dilaksanakan di Universitas Brawijaya. Akan tetapi keputusan kolektif yang melibatkan para Dekan di lingkungan Universitas Brawijaya itulah sebenarnya yang digunakan sebagai landasan. Tetapi pihak rektorat akan membantu bagi mahasiswa baru yang kesulitan membayar biaya masuk”.

*Ke empat, Drs. H Martono*

Pembantu Rektor II UM, berharap sepenuhnya kepada pemerintah untuk segera membantu kepada masyarakat ( calon mahasiswa ) berpenghasilan rendah atau kurang mampu tetapi memiliki otak encer. Pada kesempatan wawancara via telepon pada 15 Juli 2003 beliau mengatakan :

“Kebijakan biaya masuk di UM yang tahun ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan, sebenarnya lebih dipicu untuk mengikuti arus yang sudah ada. Beberapa PTN lainnya telah melakukan hal tersebut, oleh karena itu rasanya tidak mungkin bagi

UM untuk tidak loyal terhadap kebijakan tersebut. Satu hal perlu dicatat bahwa tambahan atau pungutan-pungutan lain yang berkaitan dengan biaya masuk bagi mahasiswa baru di UM, jumlahnya relatif kecil”.

*Ke lima, Ir. H. Ali Saifullah*

Pembantu Rektor III UMM ini terkesan lebih terbuka, betapa tidak sebenarnya di UMM relatif tidak ada kenaikan biaya masuk bagi mahasiswa baru. Meskipun nominal jumlah pungutan bagi mahasiswa baru melebihi angka yang dipatok PTN, satu hal yang perlu di catat UMM adalah PTS yang dananya murni dari masyarakat tentu berbeda dengan PTN. Sekilas yang sempat diutarakan pada wawancara yang dilakukan pada 20 Juli 2003 :

“Soal kebijakan biaya masuk di PTS itu berbeda dengan di PTN, ini yang perlu disadari, meski demikian pihak universitas masih memberi kelonggaran bagi mahasiswa yang kurang mampu dengan cara mencicil”. UMM masih memperlakukan kebijakan seperti tahun-tahun sebelumnya jadi pada tahun ini tidak mengalami kenaikan yang cukup besar seperti yang dilakukan beberapa PTN yang lainnya”. ( Wawancara Agustus 2003 )

*Ke enam, Prof. Dr. Ir. Hendrawan Susanto, M.rur.Sc.*

Ketua LP3 Unibraw ini agak berbeda dalam melihat dunia pendidikan, pandangannya yang cukup kontroversial dan sedikit konservatif tentang PT, bahwa PT itu tidak dapat berbuat banyak manakala tanpa ditunjang oleh pendanaan memadai, oleh karena itu PT harusnya dikelola dengan pendanaan yang cukup. Berikut ini kutipan hasil wawancaranya pada 2 Agustus 2003 :

“Kalau ingin meningkatkan mutu pendidikan, maka satu jalan yang harus ditempuh adalah PT itu harus dengan biaya tinggi, kalau anggaran dari pemerintah dirasakan kurang mencukupi, maka satu-satunya jalan harus dengan jalan menaikkan SPP mahasiswa. Bahkan dalam wawancara tersebut diselingi dengan nada humor, perlunya kita duduk satu meja dengan berbagai unsur termasuk mahasiswa untuk membicarakan masalah ini”.

Demikian ungkap Hendrawan, yang oleh peneliti pernyataan tersebut dinilai sebagai suatu pendapat yang cukup inforiar, mengingat kondisi masyarakat Indonesia masih banyak tinggal di daerah pedesaan yang otomatis masih perlu ditingkatkan komitmennya terhadap PT.

Dari hasil wawancara tergambar, betapa kebijakan pendidikan yang harus dengan biaya tinggi sebenarnya banyak yang tidak mendukung. Hal ini kemungkinan dikaitkan dengan kondisi bangsa Indonesia saat ini sedangkan menghadapi setumpuk permasalahan disebabkan oleh krisis ekonomi, tantangan dalam menghadapi era globalisasi yang bercirikan keterbukaan dan persaingan bebas kian mendesak. Mau idak mau bangsa Indonesia harus berupaya keras untuk meningkatkan kemampuan daya saing SDM nya di percaturan dunia internasional. Dalam jangka waktu yang relatif mendesak, Indonesia harus mempersiapkan SDM yang profesional, siap pakai serta tangguh. SDM yang tidak hanya memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dan bekerjasama dengan pihak lain, tetapi juga mampu bersaing dengan SDM dari mancanegara.

Untuk mewujudkan situasi serta kondisi seperti ini, SDM Indonesia perlu memiliki bekal kemampuan dan bekal intelektual serta daya inovasi yang tinggi, juga memiliki pengetahuan dan kebiasaan yang baik untuk menerapkan sikap moral dan etika, kemampuan berkomunikasi serta negoisasi dengan pihak lain, sehingga di dunia luar SDM Indonesia layak mempunyai nilai jual, Untuk lebih jelas bagaimana sebenarnya pemetakan tentang kebijakan biaya masuk PT menurut para tokoh kelompok *target group* dan *para aktor* yang secara struktural dapat terlibat langsung dalam merumuskan kebijakan tersebut, serta dilengkapi pula oleh tokoh masyarakat yang banyak tahu terhadap persoalan

pendidikan khususnya pendidikan tinggi, di bawah ini dipetakan bagaimana pendapat dari para tokoh dan aktor seperti pada (Tabel 7) berikut ini :

**Tabel 7**

**Persepsi Target Group ( Tokoh Masyarakat ) dan Para Aktor  
Tentang Tingginya ( Mahal ) Kebijakan Biaya Masuk PT**

<b>Uraian</b>	<b>Setuju</b>	<b>Tidak Setuju</b>	<b>Ragu</b>
<b>Tokoh</b>	<b>1 orang</b>	<b>2 orang</b>	<b>-</b>
<b>Aktor</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 orang</b>

*Sumber : Hasil Wawancara di Lapangan*

Tabel diatas menunjukkan, dari kalangan tokoh masyarakat atau target group yang setuju biaya pendidikan itu mahal hanya seorang, sedangkan yang tidak setuju 2 orang. Sedangkan menurut para Aktor yang secara struktural ikut merumuskan kebijakan tersebut, ternyata sebenarnya kebijakan biaya masuk PT itu merupakan keputusan tim, oleh sebab itu pada diri para aktor ada sedikit keraguan terhadap kebijakan tersebut. Bila disimak secara mendalam timbul kesan sebenarnya para aktor yang nota bene ber latar belakang pendidik sangat mendukung biaya pendidikan murah, tetapi karena saat ini sedang menjabat yang harus mendukung lembaganya, maka kebijakan tersebut harus tetap dilaksanakan. Kebijakan biaya masuk menurut para aktor, saat ini memang dirasakan berat mengingat keadaan perekonomian yang masih terpuruk, tentu saja berdampak pula kepada masyarakat.

## **4.5. Pembahasan**

### **4.5.1. Kebijakan Pendidikan Yang Berkeadilan Sosial**

Dari beberapa data hasil penelitian penulis mencoba untuk menganalisis dalam bentuk pembahasan. Sebelumnya ingin hendak melihat bagaimana semestinya kebijakan pendidikan yang berkeadilan sosial, karena pada dasarnya pendidikan berkeadilan sosial itu merupakan jembatan untuk menuju aksesibilitas dalam memperoleh kesempatan pemerataan pendidikan, khususnya pendidikan tinggi.

Kebijakan pendidikan yang bernuansa keadilan merupakan usaha membangun sistem pendidikan yang telah ada. Pendidikan di Indonesia menurut hema penulis menghadapi dua persoalan besar, yaitu, *pertama*, persoalan paradigma serta pendekatan pendidikan yang salah, dan *kedua*, persoalan beratnya tanggungan dan seriusnya timpangan ekonomi sosial masyarakat. Kalau kedua persoalan pendidikan tersebut tidak segera diselesaikan, maka bangsa Indonesia menghadapi suatu persoalan pendidikan yang jauh lebih besar lagi.

#### **4.5.1.1. Kesalahan Paradigma dan Pendekatan**

Oleh karena pada prinsipnya penelitian ini diharapkan memperoleh dan dapat menemukan persoalan-persoalan yang membelenggu, khususnya yang berkaitan dengan masalah pendidikan, maka pada bab pembahasan ini peneliti menemukan dalam analisisnya, ternyata di dunia pendidikan terjadi suatu persoalan yang cukup serius.

Permasalahan utama dalam dunia pendidikan terjadi karena adanya kesalahan dalam paradigma dan pendekatan. Kesalahan ini merupakan warisan dari pemerintah kolonial Belanda. Sistem pendidikan yang leberalis feodalis merupakan ciri khasnya, sistem pendidikan ini se akan-akan berpayung kepada paradigma global, yaitu paradigma “kompetensi”. Sepintas paradigma kompetensi adalah wajar-wajar saja,

tetapi kalau diteliti lebih dalam ternyata paradigma ini dapat membangkitkan semangat untuk mempertahankan *status-quo* penguasa atau pemerintah yang sedang menghadapi bermacam ketimpangan kondisisosial-ekonomi. Hal ini bisa dibuktikan dengan adanya 2 alasan, yaitu, *pertama*, perbedaan alokasi subsidi yang bias antara sekolah-sekolah serta universitas-universitas negeri yang sudah maju atau terkenal (top) dengan sekolah atau universitas kelas dua (papan tengah), dan yang *kedua*, perbedaan kebijakan antara sekolah atau universitas yang dikelola oleh pemerintah (negeri) dengan sekolah swasta. Perbedaan ini sangat sistematis, maksudnya untuk tujuan ekonomi-politik, pemerintah cukup baik berhasil dalam mengendalikan pemerintahannya dengan menumpang kendaraan sistem pendidikan. Kesalahan paradigma tersebut seharusnya sudah dirubah, tetapi para *elit-strategis politik* saat ini tengah terpaku oleh pembagian kekuasaan yang akhirnya berujung kepada persoalan pembagian "reze ki". Meskipun sebenarnya pembagian reze ki tersebut ber asal dari pinjaman luar negeri yang semakin mencekiki generasi penerus ini. Oleh sebab itu sudah sewajarnya apabila paradigma tersebut mendapat perhatian untuk segera dirubah.

Tentu saja yang dikehandaki adalah paradigma pendidikan yang berkeadilan sosial, seperti yang direkomendasikan oleh Pembukaan UUD 1945 - pasal 27 yang berbunyi : *negara ikut mencerdaskan kehidupan bangsa* dan dilanjutkan dengan kata-kata : *hak untuk memperoleh pendidikan bagi semuanya*. Paradigma pendidikan "keadilan sosial" sebenarnya dapat dijadikan dasar untuk terwujudnya pembangunan masyarakat yang secara sosial ekonomi tertinggal. Subsidi tidak hanya berupa materi berbentuk uang, tetapi dapat juga berbentuk yang imaterial. Misalnya, bagaimana supaya beban ekonomi sosial tidak menjadi kendala untuk mengembangkan kepandaian berfikir dan keluhuran budaya, tapi lebih dari pada

itu bahwa adanya pengakuan sebuah fakta tentang fondasi pendidikan, baik dari pihak guru maupun murid dapat berasal dari desa. Guru di kota besar sebagian ada yang ber asal dari desa. Murid atau mahasiswa juga demikian. Itu artinya bahwa orang-orang terpelajar banyak yang ber asal dari desa. Data statistik menunjukkan, bahwa terdapat sekitar 70 prosen dari luas wilayah Indonesia berupa desa atau pedesaan. Dan disinyalir bila penduduk desa sebagian besar dapat dikelompokkan sebagai penduduk miskin atau berpenghasilan kurang.

Kedua paradigma yang saling berbenturan, yaitu : paradigma kompetensi dan paradigma keadilan sosial mengimplementasikan pendekatan sendiri-sendiri. Paradigma kompetensi lebih dekat dengan pendekatan kapitalis leberalis, di negara Indonesia dikenal dengan model feodalisme. Pendekatan ini dipopulerkan oleh kalangan pemikir ekonom *neo-clasic* yang mengacu pada ajaran ekonomi klasik dengan titik berat kepada ajaran “pertumbuhan ekonomi”. Pendekatan model ini selalu menghitung keuntungan pendidikan dari segi ongkos investasi uang dan hasil upah / gaji yang diterima oleh peserta didik ketika memasuki dunia pasar kerja.

Sebagai alternatif adalah pendekatan yang berkeadilan sosial, pendekatan ini selalu berupaya untuk memperdayakan manusia. Pendekatan ini menempatkan manusia sebagai manusia. Manusia tidak dapat dieksploitasi sebagai komoditas untuk disejajarkan dengan barang. Manusia adalah makhluk yang otonom dan merdeka, memiliki potensi yang luar biasa untuk dikembangkan. Lebih dari itu manusia mempunyai kapasitas untuk mentransfer kemampuan dan potensinya. Pendidikan dan sistemnya diadakan untuk memperdayakan manusia dengan segala kemampuan, daya serta potensinya. Oleh sebab itu pendidikan yang berkeadilan sosial mengandalkan penguatan secara preferensial terhadap kemampuan dan potensi

yang non bawaan dari para peserta anak didik, sehingga di dalam merealisasikan kemampuan dan potensi bawanya mereka dapat berkompetisi secara fair dan sehat. Kemampuan dan kompetensi adalah merupakan dua hal yang penting di dalam memasuki era persaingan bebas atau sering disebut sebagai era globalisasi yang ditandai dengan tiadanya lagi batas-batas dari suatu negara.

#### **4.5.1.2. Beratnya Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat**

Dalam skala nasional, beratnya tanggungan dan seriusnya ketimpangan ekonomi sosial ditunjukkan dengan adanya indikasi bahwa ( BPS, 1999 ), terdapat 94,5 juta orang pekerja ( produsen ) yang menanggung 208,5 mulut ( konsumen ). Kalau saja pengangguran dan para pencari kerja itu dihitung maka di Indonesia setiap satu orang menanggung 2 – 3 orang lainnya. Bayangkan saja kalau seseorang yang hanya memiliki pengetahuan setingkat SMU, pasti hasilnya kurang maksimal. Kecuali pekerjaan yang amat dinafikan oleh hukum dan agama. Maka tidak mengherankan kalau tingkat pengangguran terbuka di Indonesia sudah mencapai titik klimaks, mencapai angka 40 juta orang ( Jawa Pos, 2003 ).

Beratnya beban tanggungan ekonomi sosial pendidikan ini mengakibatkan ketimpangan ekonomi sosial bagi guru / dosen di satu pihak, tetapi juga bagi peserta didik dan keluarganya di lain pihak. Guru / dosen terpaksa menerima gaji yang amat rendah, sama seperti UMR atau bahkan lebih rendah dari UMR. Belum lagi bagi mereka yang tinggal di pelosok pedesaan, gaji mereka sering datang terlambat dan bahkan ada yang tertunda sampai terkumpul beberapa bulan. Hal yang demikian ini merupakan bentuk dari subsidi dari si miskin untuk si miskin. Di pihak lain, dengan mutu dan pelayanan pendidikan yang pas-pasan anggarannya dan guru / dosennya juga sangat minim gajinya, itu berarti bahwa subsidi intelektual dan sosial atau dengan kata lain kerugian yang

demikian ini pada akhirnya kembali kepada peserta didik itu sendiri dan para orang tua.

Selain itu, beratnya tanggungan ekonomi bangsa berakibat pada rendahnya tingkat penyelesaian peserta didik, angka *drop-out* atau putus sekolah masih tetap tinggi, dan ditenggarai penyebabnya tidak lain karena masalah kesulitan finansial keluarga peserta anak didik. Bagi mereka yang putus sekolah akan memasuki dunia lapangan kerja murah yang siap untuk dieksploitasi oleh para pialang pencari kerja. Kondisi semacam ini tentu semakin menambah beban dan mempercepat proses ketimpangan ekonomi sosial. Kalau paradigma kependidikan kompetensi dengan pendekatan ‘SDM’ yang dipakai, sebagaimana seperti selama ini, maka beratnya tanggungan dan seriusnya ketimpangan ekonomi sosial nasional semacam ini justru dapat memperparah. Dalam dunia yang semakin mengglobal, penuh persaingan dan sarat dengan pengontrolan oleh pihak yang lebih kuat, kesalahan paradigma dan pendekatan harus segera diatasi. Urgensi tersebut diisyaratkan oleh suatu kondisi bahwa Indonesia masih tertinggal dalam bidang kependidikan dibandingkan dengan sesama negara-negara di Asia Tenggara (UNDP, 1995), melaporkan bila indeks pendidikan Indonesia hanya 0,77, tertinggal oleh Filipina yang sudah dapat mencapai 0,90, sedangkan Thailand dan Vietnam masing-masing 0,81.

Beratnya tanggungan sosial ekonomi masyarakat Indonesia juga melanda dunia kampus. Beberapa universitas saat ini tengah mengalami penurunan jumlah pendaftar, tidak saja hal ini dialami oleh PTS, tetapi PTN pun juga terkena imbasnya. Tentu saja hal ini disebabkan karena semakin tingginya biaya masuk ke PT. Belum lagi masyarakat harus dihadapkan pada kenyataan direalisikannya beberapa PT untuk berubah status menjadi Perguruan Tinggi Badan Hukum

Milik Negera ( PT BHMN ), kebijakan ini membawa dampak kepada masalah persoalan biaya atau anggaran PT. Berberapa isu yang sempat mencuat dipermukaan, untuk menjadi mahasiswa dari sebuah PT BHMN harus dengan membayar sekian puluh juta, bahkan untuk beberapa fakultas unggulan biaya masuknya dapat mencapai angka ratusan juta rupiah.

Tentu hal yang demikian ini sangat bertolak belakang dengan situasi perekonomian rakyat Indonesia pada umumnya. Pendapatan masyarakat Indonesia yang hanya USD 600 per kepala, demikian tulis Priyono Tjiptoherijanto dalam ( Jawa Pos, 2003 ) akan mengalami kesulitan bila harus membayar sampai ratusan juta rupiah. Meskipun berbagai alasan dikemukakan oleh beberapa PT yang menaikkan tarif biaya masuk, tetapi satu hal yang harus diperhatikan yaitu kondisi sosial ekonomi masyarakat Indonesia. Kelompok aliran masyarakat yang setuju dengan biaya pendidikan itu tinggi hendaknya berfikir kembali, termasuk juga kebijakan pendidikan yang ber orientasi kepada kapitalisasi, sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia maka sudah seharusnya apabila implementasi kebijakan pendidikan mempunyai akses kepada pemerataan dan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat. Indonesia sebagai negara berkembang masih sangat membutuhkan peningkatan SDM sampai ke jenjang PT. Model implementasi kebijakan pendidikan biaya murah sudah pernah dilakukan, yaitu kebijakan wajib belajar sembilan tahun, tetapi banyak kalangan menyayangkan mengapa kebijakan tersebut tidak diteruskan sampai kejenjang PT. Data yang pernah dimuat di harian ( Kompas, 2004 ), ternyata masyarakat Indonesia saat ini yang berpendidikan sampai di jenjang pada PT hanya mencapai angka tidak lebih dari 5 % dari keseluruhan jumlah penduduk. Tentu sangat berbeda bila dibandingkan

dengan negara –negara lain yang sangat memperhatikan serta memprioritaskan tingkat pendidikan penduduknya.

Meskipun saat ini tengah di dengang-dengungkan oleh pemerintah untuk memberikan bebas biaya sekolah di tingkat SD dan SMP, akan tetapi bahasan dalam tesis ini mengkaji dan menyoroiti persoalan biaya di lembaga Perguruan Tinggi ( PT ).

#### **4.5.2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan Biaya Masuk PT Terhadap Aksesibilitas Dalam Masyarakat Untuk Memperoleh Kesempatan Pemerataan Pendidikan Tinggi**

Anggaran Pendidikan di Indonesia melalui Kebijakan Pemerintah dalam APBN Tahun 2003 yang hanya sebesar 4,21 % dari keseluruhan jumlah APBN dapat disebut sebagai salah satu penyebab dari pada terjadinya biaya pendidikan Indonesia menjadi lebih tinggi, yang pada akhirnya berdampak pada masyarakat, khususnya masyarakat golongan ekonomi kelas bawah. Meskipun sebenarnya telah di amanatkan oleh UUD 1945 dan UU Sisdiknas 2003 bahwa di dalam masyarakat harus ada aksesibilitas pendidikan sampai ke jenjang PT, tetapi oleh karena kebijakan biaya masuk ternyata PT cukup tinggi, akibatnya masyarakat tidak mungkin untuk menjangkaunya.

Seiring dengan hal tersebut, lahirlah PP 61 Tahun 1999 yang mengijjinkan setiap PT untuk menggali dana sendiri, atau dalam bahasa yang cukup populer yaitu otonomi kampus. Sekilas untuk difahami bahwa otonomi kampus tidak memiliki kaitan sedikitpun dengan otonomi daerah ( otoda ) yang kini sedang banyak diperbincangkan. Tetapi filosofinya sama yaitu ada kebebasan dalam menentukan nasibnya sendiri. Dengan begitu maka setiap PTN diberi kebebasan penuh untuk mengelola, mengembangkan dan menggali dana dari masyarakat

se banyak-banyaknya. Maka momentum seperti ini dijadikan alat untuk mencari kesempatan oleh PT membuat kebijakan pendidikan dengan biaya tinggi.

Bersamaan dengan itu, maka pada tahun 2003 ini lahirlah PT BHMN (Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara). Meskipun untuk sementara waktu sebagai *pilot project* telah ditunjuk 4 PTN, yaitu : UI, ITB, UGM dan IPB, namun pengaruhnya menjalar ke beberapa PTN lainnya, termasuk ke Unibraw, UM dan UMM. Ini dibuktikan dengan adanya kenaikan yang signifikan kebijakan biaya masuk pada tahun ini, pada hal untuk tahun-tahun sebelumnya tidak pernah terjadi ada kenaikan yang cukup ber arti, kalau toh pun demikian ada kenaikan biasanya dilakukan dengan cara ber tahap.

Kebijakan dalam bidang pendidikan seharusnya mengacu pada arah dan tujuan yang ingin dicapai oleh masyarakat Indonesia. Tanpa berpegang pada arah tujuan bangsa Indonesia, pendidikan tidak akan memiliki acuan operasional yang jelas dan menyeluruh. Kebijakan demikian akan mudah terjebak dalam lingkaran persoalan-persoalan yang parsial dan temporer. Meninggalkan arah dan tujuan nasional sebagai acuan, juga bisa menimbulkan terjadinya inovasi di bidang pendidikan.

Dalam kaitan dengan tujuan bangsa Indonesia, tentu saja harus memperhatikan pada konstitusi negara RI. Berangkat dari Undang-undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara RI terdapat beberapa pesan dalam UUD 1945 yang perlu dicermati kalangan pendidikan, antara lain yang pertama adalah formulasi kalimat :

“-----*mengupayakan kesejahteraan umum* -----“

alinea keempat mukadimah UUD 1945. Bagi dunia pendidikan, formulasi kalimat ini harus diartikan bahwa penyelenggaraan pendidikan adalah untuk

mengupayakan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan bukan malah sebaliknya, hanya sebagian dari kelompok masyarakat sudah sejahtera yang dapat menikmati pendidikan.

Pada batang tubuh UUD 1945, pasal 31 yang berbunyi : ‘Setiap warga negara berhak mendapat pengajaran’, juga mengandung esensi pemerataan hak seluruh warganegara dalam hal kesempatan memperoleh pendidikan pada setiap tingkatan pendidikan. Pasal ini, dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang No.2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, saat ini tengah berlaku Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Dalam skala operasional pada lingkup yang lebih kecil, kebijakan pendidikan dalam hal ini adalah Kebijakan Biaya Masuk PT, pada tahun ini hampir terjadi di setiap PTN, dengan jumlah yang cukup besar. Istilahnya ber macam-macam, tetapi maksudnya sebenarnya sama, yaitu ketetapan yang dibuat oleh PT bagi mahasiswa untuk membayar sejumlah uang yang jumlahnya sangat besar bagi ukuran kebanyakan masyarakat Indonesia. Jelas hal yang demikian ini sangat bertolak belakang dengan rumusan teori *public choice* menekankan kepada kebutuhan masyarakat. Apa yang menjadi kemauan dari masyarakat pemerintah harus menyediakan.

Dengan begitu nampak jelas bahwa Kebijakan Biaya Masuk PT yang pada tahun ini sudah di implementasikan di beberapa PTN di Indonesia, termasuk di Unibraw, UM dan UMM tidak sesuai dengan teori *public choice* yang juga menekankan adanya kebijakan rasional, kebijakan yang rasional tidak lain adalah kebijakan yang dapat diterima oleh masyarakat luas, demikian menurut Rachbini dan Arifin, ( 2001 ).

Kebijakan Pendidikan, dalam hal ini Kebijakan Biaya Masuk PT yang sudah tidak ada kesesuaian, seperti yang telah dikemukakan diatas. Dan permasalahan dari penelitian ini adalah masalah aksesibilitas masyarakat untuk memperoleh kesempatan pemerataan pendidikan tinggi, pada konsep aksesibilitas digariskan menjadi 3 ( tiga ) aspek, yaitu : harus ada aspek persamaan kesempatan aspek aksesibilitas sendiri dan aspek keadilan atau kewajaran.

Bila dikaitkan dengan batasan rumusan tersebut dengan hasil penelitian di lapangan, maka Kebijakan Biaya Masuk PT ( Unibraw, UM dan UMM ) tidak memenuhi unsur-unsur yang ada di dalam konsep aksesibilitas. Kebijakan di laksanakan di ke tiga universitas tidak memenuhi aspek persamaan kesempatan, tidak ada keadilan dan tidak ber akses. Disana terjadi jurang sangat dalam antara besar biaya masuk PT dengan pendapatan masyarakat secara umum. Makna dari persamaan kesempatan, aksesibilitas dan keadilan tidak lain adalah adanya keseimbangan antara pengeluaran dan pendapatan.

Ketidak berhasilan Kebijakan Pendidikan untuk memberikan akses kepada masyarakat berpenghasilan rendah untuk memperoleh kesempatan pemerataan pendidikan tinggi di sebabkan karena 2 faktor, yaitu : ( 1 ) faktor tujuan kebijakan yang tidak jelas ; ( 2 ) faktor perilaku dari para aktor pelaksana kebijakan. Menurut ( Mazmanian dan Sabattier ), kedua faktor tersebut merupakan faktor penghambat suatu Implementasi Kebijakan. Dengan begitu maka setiap kebijakan harus dibuat dengan tujuan yang jelas, sehingga dapat mencapai sasaran yang diinginkan. Demikian pula ke gagalannya suatu kebijakan tidak menutup kemungkinan disebabkan karena faktor kualitas aktor pelaksananya. Apabila hal tersebut di kaitkan dengan hasil penelitian, ke dua faktor dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Kebijakan biaya masuk PT dibuat tanpa dengan tujuan yang jelas ;
2. Perilaku para *stakeholders* yang menetapkan besar jumlah biaya masuk PT tidak melalui proses sosialisasi terlebih dahulu.

Dalam merumuskan suatu kebijakan seharusnya mempunyai tujuan yang jelas, sehingga hasilnya sesuai dengan yang diharapkan bukan merupakan suatu pekerjaan yang mudah. Hal ini disebabkan karena setiap kebijakan tidak mungkin dapat terlepas begitu saja dari aspek politis, Wibawa, (1993). Oleh karena itu belajar dari kesulitan dalam merumuskan kebijakan yang baik ini perlu adanya pemikiran untuk membuat kebijakan bersifat partisipatif. Itulah solusi yang mungkin dilakukan agar setiap kebijakan yang telah dirumuskan dapat diterima oleh semua pihak. Untuk itu dimasa mendatang pengusulan program harus melalui seleksi yang rasional dan bersifat terbuka, sehingga memungkinkan untuk mendapat koreksi dari publik, pada akhirnya menghasilkan suatu kebijakan yang berkualitas dan dapat diterima dengan baik oleh publik.

Selain itu faktor perilaku para aktor merupakan sesuatu yang harus diperhatikan dengan seksama dalam merumuskan satu kebijakan. Sikap mental yang baik untuk mensukseskan satu kebijakan yang dipercayakan kepadanya agar tercapai tujuan yang telah ditetapkan, untuk itu saat penjaringan calon aktor yang menentukan kebijakan harus dicarikan dari calon yang mempunyai tingkat kredibilitas dan memiliki komitmen kuat yang sesuai dengan bidang keahliannya.

Kebijakan Pendidikan merupakan kebijakan yang sangat strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh sebab itu kebijakan ini harus melibatkan orang-orang (aktor) yang memiliki integritas demi kemajuan bidang pendidikan. Hal ini penting dikemukakan mengingat jika aktor pelaksana kebijakan pendidikan tidak mempunyai sikap mental seperti yang diharapkan banyak kalangan, maka

aktor tersebut bertindak semau gue se enaknya demi untuk kepentingan dan keuntungan pribadi dan kelompoknya. Seiring dengan hal tersebut, Verspoor, (1989) dalam salah satu bukunya menyatakan, salah satu syarat keberhasilan implementasi kebijakan di bidang pendidikan adalah adanya komitmen pelaksana dan semua pihak yang terlibat dalam program yang sudah ditetapkan.

Menurut hemat penulis, terdapat 2 hal penting harus diperhatikan saat merumuskan suatu kebijakan, dalam hal ini adalah kebijakan pendidikan, dengan maksud agar diperoleh suatu kebijakan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Dan oleh karena yang dicapai adalah dampak kebijakan pendidikan berakses kepada kesempatan pemerataan pendidikan tinggi, kedua faktor tersebut adalah :

*Pertama*, kebijakan pendidikan harus jelas, perlu disosialisasikan terlebih dahulu ke masyarakat sebelum di implementasikan. *Kedua*, Aktor yang memutuskan kebijakan pendidikan harusnya seseorang yang memiliki loyalitas, komitmen, kapabilitas di bidang pendidikan.

#### **4.5.3. Hubungan Antara Tingkat Kemampuan Ekonomi Masyarakat Dengan Kebijakan Biaya Masuk PT**

Kebijakan biaya masuk PT ternyata berdampak kepada masyarakat untuk tidak dapat memperoleh kesempatan pemerataan pendidikan tinggi, atau dengan kata lain, tidak ada akses. Ketidak berhasilan kebijakan pendidikan tinggi (kebijakan biaya masuk PT) dikarenakan kebijakan tersebut tidak memiliki tujuan yang jelas dan masih dilakukan setengah hati oleh para aktor pengambil kebijakan. Meskipun SPP tidak mengalami kenaikan tetapi biaya lainnya mengalami kenaikan yang cukup besar. Tentu saja hal ini sangat memberatkan masyarakat untuk dapat menyekolahkan anaknya sampai ke jenjang PT.

Melihat realitas sebagaimana yang telah diuraikan, ternyata ada hubungan antara Kebijakan Biaya Masuk PT dengan Kemampuan Ekonomi Masyarakat, Jika tingkat kemampuan masyarakat tinggi atau meningkat, maka angka putus sekolah atau angka tidak melanjutkan ke PT berkecenderungan menurun. Sinyalemen ini sesuai dengan hasil penelitian Damara (1993), dan Sumarno (1981) yang menyatakan bahwa, "aspek ekonomi merupakan pertimbangan seseorang untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi".

Temuan hasil penelitian tersebut, ternyata ada kesamaan dengan hasil survey *Word Bank* pada tahun 1998 menyimpulkan, hampir 50 % kasus terjadinya putus sekolah di Indonesia disebabkan karena faktor ekonomi, juga Penelitian Dedi (1994) terhadap keluarga miskin di daerah Jawa Barat telah diketemukan bahwa ada dua faktor utama yang menyebabkan terjadi putus sekolah, yaitu adanya faktor ekonomi yang tidak memadai dan faktor motivasi yang rendah dari pada para siswa.

Pengaruh faktor ekonomi masyarakat atau para orang tua siswa dalam upaya untuk menekan angka putus sekolah (tidak melanjutkan ke PT) seperti yang diketemukan dalam penelitian ini kiranya sejalan dengan *Teori Morphet dan Roe* (1990) berpendapat bahwa, "bagi setiap keluarga yang membiayai pendidikan di sekolah selalu membandingkan antara biaya dikeluarkan dengan pendapatan yang diperolehnya". Oleh karena itu maka faktor ekonomi merupakan faktor paling dominan jadi tidaknya siswa sekolah melanjutkan ke jenjang PT.

Dalam rangkai untuk mengatasi semakin meningkatnya jumlah lulusan SMU yang tidak melanjutkan studi ke PT, maka satu-satu jalan yang harus ditempuh oleh pemerintah yaitu dengan cara segera memberikan bantuan dana berupa bea siswa atau dengan jalan memberikan berbagai kemudahan kepada

masyarakat kurang mampu agar dapat melanjutkan studi ke PT tanpa harus memikirkan bermacam tarikan biaya masuk yang cenderung sangat memberatkan. Sebenarnya upaya meringankan beban masyarakat untuk membayar biaya pendidikan merupakan perwujudan dari UUD 1945 dan GBHN, intinya bahwa, pemerintah mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh sebab itu suatu kewajiban bagi pemerintah memberikan pelayanan kepada publik tanpa harus mengharapkan imbalan jasa dalam bentuk apapun.

Anggaran sektor pendidikan di APBN yang hanya dipatok 4,12 % tidak sama sekali mencerminkan kepekaan terhadap dunia pendidikan. Paling tidak konsistensi pemerintah diperlukan dalam hal ini. UUD 1945 dan UU Sisdiknas yang telah menetapkan anggaran pendidikan sebesar 20 % tidak dapat dipenuhi, tentu saja dampaknya sangat berpengaruh signifikan terhadap perkembangan pendidikan di Indonesia.

Memperhatikan kondisi semacam ini, peneliti mencoba mengajukan usul agar kebijakan biaya masuk di tiga PT pada tahun mendatang perlu ditinjau ulang dengan jalan memangkas beberapa biaya lain yang tidak terlalu penting. Disamping itu, untuk membantu masyarakat kurang mampu agar dapat melanjutkan ke PT pihak pengelola harus pandai-pandai mencari bea siswa secara langsung kepada para calon mahasiswa yang dijadikan sebagai kelompok sasaran.

Sedangkan apabila jika PT terpaksa memerlukan dana untuk membiayai keprluan se hari-hari dalam rangka meningkatkan kualitas lulusannya, maka PT bersangkutan dapat menggali dana dari masyarakat lebih mampu dan masih sangat dimungkinkan mencari peluang terobosan berkerjasama dengan pihak lain. Meskipun sebenarnya program bea siswa sudah dilakukan dengan melibatkan

berbagai lembaga maupun yayasan-yayasan, akan tetapi jumlah bea siswa yang diberikan masih belum mencukupi dengan besarnya jumlah biaya kebutuhan yang dikeluarkan, termasuk jumlah penerima bea siswa, hanya sekian presennya saja. Dari sisi pihak orang tua dan mahasiswa, kesempatan untuk menerima bantuan bea siswa adalah peluang yang jarang sekali di sia-siakan. Kemauan yang begitu besar dari pada orang tua dan mahasiswa untuk dapat melanjutkan kuliah ke PT merupakan impian setiap orang. Hanya karena faktor biayalah sehingga banyak kalangan masyarakat yang kurang beruntung dari sisi ekonomi tertutup kesempatannya untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.

Mencoba melihat pembahasan dari sisi lain, pemerintah apabila berkeinginan untuk memberikan porsi yang besar kepada sektor pendidikan sebenarnya bisa-bisa saja. Meskipun jumlah dana yang harus disediakan tidak sedikit. Tetapi jumlah tersebut tidak berarti jika dibandingkan dana pemerintah yang di korupsi oleh pihak tertentu. Berapa trilluan rupiah yang dibawa kabur oleh para konglomerat sampai saat ini belum juga dapat diketemukan. Tentu alangkah bijaksananya apabila konsentrasi dana pemerintah tersebut jauh-jauh hari telah di program untuk sektor pendidikan. Yang mana sebenarnya biaya pendidikan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu merupakan investasi jangka panjang. Jadi dana dan biaya dari pemerintah untuk pendidikan tidak hilang percuma begitu saja, tetapi merupakan investasi masa depan.

Pengalaman negara lain yang sejak lama sangat memperhatikan sektor pendidikannya, begitu negara tersebut ditimpah oleh badai dan gejolak ekonomi politik, maka negara tersebut tidak sampai goncang. Hal ini disebabkan karena SDM masyarakatnya yang sudah lebih baik dari hasil sebuah investasi.

Bandingkan dengan negara Indonesia yang belum perhatian sepenuhnya kepada sektor pendidikan dalam soal pembiayaan, begitu terkena krisis multi dimensi yang berujung kepada krisis ekonomi, hingga sampai saat ini krisis tersebut masih belum pulih. Dengan kata lain, andaikata saja Indonesia sejak lama mengimplementasikan kebijakan biaya pendidikan yang ber akses ke masyarakat untuk memperoleh kesempatan pemerataan pendidikan sampai ke PT, niscaya hasilnya akan lain. Mungkin Indonesia akan lebih baik, dapat sejajar dengan sesama negara tetangga lainnya.

Dalam peradaban sejarah umat manusia, suatu pengalaman penting yang dapat digunakan sebagai pelajaran, bahwasannya ternyata belum pernah terjadi ada suatu negara yang gulung tikar hanya karena kekayaannya untuk membiayai sektor pendidikan. Bahkan investasi pendidikan yang berjangka panjang tersebut, hasilnya nampak sekali saat-saat genting dimana negara sedang membutuhkan. Mengapa demikian, begitu ada krisis melanda, dengan segera dapat diketemukan solusi pemecahannya, sehingga krisis multi dimensi, baik ekonomi, politik, sosial dapat segera diatasi. Model kebijakan seperti ini dilakukan oleh negara-negara seperti Malaysia, Singapura. Khususnya Malaysia yang 10 tahun lalu pernah belajar pendidikan ke Indonesia, kini telah bangkit dan bahkan melebihi Indonesia.

#### **4.5.4. Pilihan Antara Kebijakan Profit dan Nonprofi**

Yang perlu di kaji dalam kaitannya dengan Kebijakan Biaya Masuk PT, tentu saja hal-hal yang berkaitan dengan masalah keuangan. Anggaran merupakan persoalan klasik yang selalu muncul di setiap organisasi. PT meskipun sejatinya bertujuan sosial, tetapi masalah anggaran merupakan faktor yang sangat penting. Karena bagaimanapun juga tanpa anggaran pasti PT tersebut tidak

dapat ber operasi. Khususnya PTS, hidup dan matinya lembaga ini sangat ditentukan oleh besar dan kecilnya dana yang dimiliki. Meskipun hal tersebut terjadi juga di PTN. Oleh karena itu masalah dana pasti menjadi skala prioritas, profit dan non profit akan selalu menjadi bahan evaluasi kebijakannya. Untuk melangkapi dan sekaligus ingin mengemukakan persoalan utama yang dihadapi oleh setiap PT, maka berikut dibawah ini diberikan bahasan tentang kebijakan profi dan non profit.

Pengelolaan pendidikan tinggi di Indonesia saat ini pada suatu titik diantara PT sebagai unit usaha sosial dan PT sebagai suatu unit usaha ekonomi. Pada momen tertentu PT lebih terlihat sebagai unit usaha sosial, tetapi pada saat yang lain berganti rupa menjadi suatu unit usaha ekonomi. Secara institusional formal dan berdasarkan visi serta misi organisasi, jelas PT merupakan suatu unit usaha sosial, suatu aktivitas sekompok anggota masyarakat untuk turut serta berpartisipasi mencerdaskan bangsa. Bentuk dari institusi, visi dan misi ini sampai sekarang masih belum berubah, dimana masih mencerminkan PT sebagai unit usaha sosial.

Akan tetapi, waktu pun berjalan, pendidikan tinggi saat ini makin memperjelas kiprahnya sebagai suatu komoditas yang dibutuhkan orang. Hukum permintaan dan penawaran dalam teori ekonomi yang nasuk ke dalam tubuh PT, menjadikan PT tidak dapat berdiri murni dalam visi sosial tanpa terinfeksi visi ekonomi. Repotnya, makin lama visi ekonomi pada penyelenggaraan pendidikan tinggi semakin besar dan dominan.

Salah satu kendala dalam mewujudkan pemerataan kesempatan berpartisipasi di PT dan menjadikan PT sebagai institusi yang bisa berperan banyak untuk

mengubah struktur sosial masyarakat adalah visi ekonomi yang ditanamkan oleh sekelompok orang dalam pengelolaan PT. Mengapa demikian ?

*Pertama*, dalam hukum permintaan dan penawaran pada teori ekonomi, tinggi rendahnya nilai akan suatu barang ( *goods* ), sangat ditentukan oleh jumlah ketersediaan dari barang tersebut. Bila barang itu ada dimana-mana dan mudah di dapat, maka ia bernilai ekonomi rendah. Sebaliknya, semakin langka suatu barang tersebut diperoleh, semakin tinggi nilai ekonomisnya. Dengan gambaran ini, maka jelas mengapa banyak pihak-pihak yang tidak menyukai diadakannya pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam PT. Karena perluasan kesempatan menurunkan nilai ekonomis kesempatan itu sendiri. Ide pemerataan kesempatan berpartisipasi di PT tidak menguntungkan pengelola pendidikan tinggi.

*Kedua*, berkembangnya pola kehidupan kapitalistik di berbagai bidang kehidupan pada dua dasawarsa terakhir, dengan tidak terkecuali merusak ke dalam dunia pendidikan tinggi. Tidak dapat dimungkiri, usaha di bidang pendidikan tinggi juga melakukan penciptaan profit. Hal ini sangat mungkin dilakukan karena PT secara finansial hanya mendapat beban kewajiban sebagai badan usaha non profit yang berbeda dengan badan usaha ekonomi lainnya. PT harus dimaknai juga sebagai sebuah investasi jangka panjang yang hasilnya baru dapat dirasakan setelah beberapa tahun kemudian. Oleh karena itu instuisi pendidikan merupakan lembaga yang harus diprioritaskan oleh suatu negara.

#### **4.5.5. Kualitas Lulusan dan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Untuk Peningkatan Kualitas SDM**

Sebagai bahasan terakhir dalam penelitian ini, satu hal yang perlu dikemukakan adalah masalah peningkatan kualitas SDM yang berkaitan dengan kualitas lulusan serta bagaimana proses seleksi penerimaan mahasiswa baru

dilaksanakan. Bagaimanapun juga PT mempunyai tugas utama yaitu menciptakan kualitas SDM, khususnya bagi para lulusannya atau para alumninya. Kualitas kelulusannya tidak saja sebatas pada dunia ilmu pengetahuan murni tetapi kualitas lulusan PT diharapkan juga mampu memecahkan setiap persoalan yang berkembang ditengah sosial masyarakat.

Ibaratnya seperti dua sisi dari sekeping mata uang antara kualitas lulusan dengan bagaimana proses seleksi penerimaan mahasiswa baru bagi suatu PT. Dalam setiap penerimaan mahasiswa baru selalu saja diketemukan beberapa kejadian yang memprihatinkan adanya beberapa calon mahasiswa baru yang pada akhirnya tidak jadi mendaftar atau mengundurkan diri setelah mengetahui besar biaya masuk ke PT, meskipun sebenarnya keinginan atau hasyrat masuk ke PT sangat besar. Dan tidak sedikit jumlahnya calon mahasiswa baru yang mengundurkan diri meski sebenarnya memiliki otak encer. Oleh karena itu suatu hal yang wajar dan realistis apabila dalam setiap analisis peningkatan kualitas SDM akan selalu dikaitkan dengan bagaimana kualitas lulusan PT dan bagaimana pula bentuk atau pola seleksi penerimaan mahasiswa baru dilakukan. Sedangkan kualitas SDM itu sendiri merupakan *out put* yang hendak dicapai oleh setiap lembaga pendidikan termasuk PT. SDM tidak saja dapat dipandang sebagai suatu potensi yang luar biasa, akan tetapi lebih dari SDM merupakan suatu keharusan yang harus dimiliki oleh suatu negara.

#### **4.5.5.1. Kualitas Lulusan**

Perguruan Tinggi adalah suatu satuan organisasi yang memiliki kinerja meningkatkan kualitas lulusannya atau para alumninya sebagai hasil proses pendidikan yang dilaksanakannya. PT tidak memiliki kepedulian terhadap kualitas lulusan dan terhadap bagaimana perkembangan para alumninya setelah menyelesaikan

pendidikan, juga yang tidak mempunyai kepekaan kepada alumninya bisa berkiprah dan eksis di dalam masyarakat, dapat disebut sebagai PT yang tidak memiliki kepekaan sosial, tentu hal yang demikian ini sangat menyimpang dari Tri Dharma PT khususnya dalam lingkup dharma pendidikan.

Pandangan di sisi lain, PT yang tidak memiliki kepedulian apakah alumninya diminati atau tidak oleh para penyerap sumber daya manusia, atau apakah kondisi intelektual para lulusannya sudah sesuai dengan kebutuhan pasar, tentu bila terjadi hal yang demikian maka PT tersebut dapat dikatakan sebagai PT yang tidak memiliki etika. Perkembangan lulusan di tengah masyarakat sebenarnya sangat ditentukan oleh bekal yang diperoleh ketika menjalani proses pendidikan. Proses pendidikan yang tidak atau kurang serius, menghasilkan lulusan kurang memiliki kualitas. Rendahnya mutu lulusan sangat berpengaruh terhadap perkembangan alumni di mata masyarakat, karena kualitas alumni bukan saja berkaitan erat dengan faktor-faktor internal yang terdapat pada diri para lulusan seperti kemampuan kerja, daya kreativitas dan sikap mental, tetapi juga berkaitan dengan beberapa faktor eksternal alumni antara lain pengakuan masyarakat penyerap sumber daya manusia terhadap kredibilitas PT tersebut.

Intrepretasi lainnya, tanggung jawab PT terhadap para peserta didik tidak hanya terbatas pada masa proses pendidikannya saja, melainkan terus berlanjut sampai pada saat ketika para alumni memasuki masa setelah menyelesaikan pendidikan dan masuk ke dalam kehidupan masyarakat. Harus ditumbuhkan asumsi bahwa eksis atau tidaknya alumni menapaki masa depan di dalam kehidupan masyarakat sangat bergantung pada pendidikan yang diperoleh di PT. Kesuksesan lulusan berkiprah dan eksis di dalam kehidupan masyarakat dijadikan indikator keberhasilan PT, ketidak berdayaan alumni untuk berkiprah di tengah-

tengah masyarakat mencerminkan ketidakberhasilan PT ketika mereka menjalani proses pendidikan.

Dari prediksi diatas, dapat pula dikatakan apabila tanggung jawab PT kepada lulusan atau out-put pada hakekatnya merupakan pencerminan tanggung jawab terhadap masa ketika proses pendidikan dilakukan. Karena alumni yang dicetak adalah hasil dari prosesi pendidikan tersebut, maka hasil yang dicapai berkaitan dengan proses pendidikan sejak awal masuk ke dalam dunia kampus sampai dapat menyelesaikan studyns. Proses yang berlangsung mulai dari sistem seleksi mahasiswa baru, proses pendidikan dan sistem penilaian yang berlaku.

Akuntabilitas PT ini perlu dibangun dan dihidupkan, karena produk PT seharusnya adalah manusia-manusia yang dapat eksis di dalam masyarakat dalam kapasitas dan kualitas sebagai penyandang predikat lulusan PT. Hasil ini baru terlihat setelah peserta didik selesai mengikuti pendidikan dan terjun ke masyarakat. Sampai kini disengaja atau tidak disengaja telah berkembang di masyarakat bahwa PT seperti tidak perlu mempertanggungjawabkan terhadap kondisi dan persoalan alumni setelah menyelesaikan pendidikannya, keluar dari PT dan ke masyarakat. Apapun kondisinya lulusan setelah selesai pendidikan dianggap sebagai urusan alumni sendiri, bukan menjadi persoalan PT lagi. Itu berarti PT tidak terbebani akuntabilitas atas kinerjanya.

Problematika ini tentu saja dapat merangsang persaingan terbuka yang ditandai dengan munculnya banyak PT yang lebih berorientasi bisnis daripada orientasi sosial, juga membidani lahirnya banyak masalah negatif di kalangan penyelenggaraan PT misalnya kurangnya pengembangan sistem dan substansi mata kuliah, keseriusan dosen dalam mengajar, dan PT lebih mengejar prestasi

formal seperti pengakuan atau akreditasi dari pemerintah daripada mengejar prestasi substansial berbentuk kualitas lulusan yang memiliki keahlian dibidangnya. Menguatnya orientasi bisnis tidak terlepas dari pengaruh sistem pertanggung jawaban kinerja PT untuk lebih berorientasi terhadap akuntabilitas formal kepada pemerintah.

#### **4.5.5.2. Pola Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru**

Aksesibilitas Pendidikan Tinggi berkorelasi positif dengan bentuk atau pola dari seleksi penerimaan mahasiswa baru. Sinyal ini dipertajam dengan pemberitaan di harian (Kompas, 2004) dengan judul “UGM Bebaskan Biaya Pendidikan Mahasiswa Tidak Mampu dan Bibit Unggul Berprestasi”, yang pada intinya bahwa Universitas Gadjah Mada (UGM) mulai tahun ini menaikkan prosentase penerimaan bagi mahasiswa tidak mampu dengan jalan membebaskan biaya pendidikan melalui cara mencari penyanggah dana selama delapan semester.

Selanjutnya yang perlu untuk digaris bawahi kemudahan dalam seleksi penerimaan selalu berkaitan dengan masalah kualitas lulusan. Dengan argumentasi agar supaya dapat menjaring calon mahasiswa yang memiliki kemampuan akademik dan mendeteksi kesesuaian antara potensi akademik dengan bidang yang diminati calon mahasiswa, seleksi calon mahasiswa baru dilakukan oleh seluruh PT. Disamping itu, ada kecenderungan PT yang tidak melakukan seleksi dianggap sebagai PT yang kurang diminati atau baru berdiri dan belum memperlihatkan profesionalitas yang diakui masyarakat, sehingga bersedia membuka pintu lebar-lebar kepada setiap calon mahasiswa yang berminat, semata-mata untuk memenuhi persyaratan jumlah mahasiswa minimal yang dibuat oleh Depdiknas, khususnya bagi PTS.

Dari seleksi ini muncul perilaku pasar, semakin besar daya tarik suatu PT karena dimiliki berbagai fasilitas indikator seperti status oleh kopertis yang mengidentifikasi kemampuan, semakin ketat proses seleksinya. Perilaku pasar ini tidak terlepas kaitannya dengan daya tampung PT tersebut. Prosesi seleksi terhadap para calon mahasiswa dilakukan dengan berbagai cara. Dari yang paling sangat sederhana dan longgar sampai kepada pola sistem seleksi yang sangat ketat. Biasanya seleksi dilakukan untuk melihat pemenuhan terhadap syarat-syarat formal dan syarat-syarat substansial. Anehnya, pada umumnya PT sama sekali mengabaikan perolehan nilai calon siswa di sekolah menengah umum ( SMU ). Sepertinya nilai yang diperoleh peserta didik di SMU tidak ada artinya untuk melanjutkan ke PT. Ujian yang dijalani calon mahasiswa selama di SMU, seakan-akan tidak ada kaitannya dengan peluang masuk PT.

Dalam perkembangannya, untuk memenuhi syarat-syarat substansial yaitu potensi akademik para calon, terjadi pergeseran dan pemekaran makna. Jika awalnya semata-mata hanya potensi akademik para calon sampai sejauh kemampuan mereka dalam menyelesaikan soal tes, kali ini banyak PT yang membuka kesempatan kepada para calon untuk mengkompensasikan ketidak berhasilannya menyelesaikan soal test ujian dengan penambahan jumlah finansial. Caranya, peserta test diklasifikasikan ke dalam berbagai strata berdasarkan hasil test. Peserta yang lulus dengan menempati nilai peringkat pertama mendapat beban paling ringan dalam membayar biaya masuk. Sebaliknya, peserta yang menempati urutan kedua dan seterusnya mendapat beban biaya yang makin ke bawah, makin mahal. Artinya setiap kemerosotan strata hasil seleksi mempunyai konsekuensi penambahan biaya yang harus dikeluarkan untuk bisa masuk ke PT. Dampak negatif yang mungkin muncul dari sistem klasifikasi hasil seleksi dan

implikasinya, antara lain, *pertama*, para siswa SMU yang ber asal dari keluarga relatif mampu secara ekonomi, tidak berusaha semaksimal mungkin untuk mempersiapkan diri agar bisa diterima di PT. Di kalangan mereka, terbentuk pola pikir yang kurang-lebih berbunyi sebagai berikut : “Bagaimanapun saya akan tetap bisa melanjutkan pendidikan ke PT”.

Dampak *kedua*, yang bisa ber akibat negartif pada sistem seleksi seperti ini adalah tim seleksi calon mahasiswa besar kemungkinan tergoda untuk merancang dan membuat soal-soal tes yang sangat sulit. Materi test yang sulit ini ber akibat kepada sedikitnya jumlah peserta test ujian yang diterima, dengan begitu mereka masuk dan diterima di strata dibawahnya. Oleh karena adanya sistem kompensasi kekurangan nilai hasil test dengan biaya tambahan, dengan begitu maka dana yang dapat diserap oleh PT menjadi semakin lebih besar. Penggunaan sistem ini memang lebih menguntungkan PT apalagi tanpa adanya sistem pertanggungjawaban substansial. Tetapi, dari sisi pencapaian tujuan isntitusi pendidikan dalam masyarakat secara makro, jelas sistem seleksi ini kurang tepat, dan dari sudut kepentingan masyarakat yang kurang mampu secara finansial, merupakan sistem yang merugikan.

Pola sistem seleksi seperti ini dapat mengakibatkan merosotnya lulusan PT, karena pelaksanaan penyaringan calon mahasiswa dilakukan dengan keliru. Bibit calon yang sebenarnya kurang mampu secara akademik dapat dengan mudah masuk ke dunia akademik, adapun calon yang relatif lebih mampu potensi akademiknya tidak diterima di PT yang semata-mata hanya disebabkan karena berasal dari keluarga yang kurang mampu secara ekonomis.

Fenomena menggambarkan, logika yang dipakai sebagai dasar dalam seleksi penerimaan adalah logika yang sarat dengan visi ekonomi, bukan visi akademik,

apalagi visi dan misi sosial atau pemerataan kesempatan. Implementasi sistem ini menyebabkan terjadinya pergeseran orientasi penerimaan calon mahasiswa dari yang mulanya lebih berorientasi pada calon yang lebih mampu secara akademik, menjadi ke arah calon yang lebih mampu secara finansial. Calon yang ber asal dari orang tua yang relatif mampu ekonominya, serendah apapun potensi akademik yang dimilikinya, dapat melanjutkan pendidikannya ke PT, sebaliknya calon yang meskipun secara akademik memiliki potensi yang lebih tinggi, tetap sulit melanjutkan ke jenjang PT jika memiliki kemampuan rendah dari segi finansial. Tetapi anehnya, sistem seperti ini walaupun beranjak dari paradigma yang jelas keliru, sampai saat ini masih dianggap sebagai suatu kewajaran dan se akan-akan dianggap sebagai salah satu berlakunya hukum alam, sehingga semakin lama semakin banyak PT yang tergolong cukup diminati calon peserta didik menjalankan sistem seleksi penerimaan seperti ini.